

**RESISTENSI MASYARAKAT DESA JAWISARI TERHADAP
KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI DESA JAWISARI
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020-2021**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Tiara Candra Wijayanti

1806016071

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
UIN Walisongo
Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Tiara Candra Wijayanti
NIM : 1806016071
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Resistensi Masyarakat Desa Jawisari Terhadap Kebijakan Penanganan Covid-19 di Desa Jawisari Kabupaten Kendal Tahun 2020-2021

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2022

Pembimbing,



Muhammad Mahsun, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

RESISTENSI MASYARAKAT DESA JAWISARI TERHADAP KEBIJAKAN
PENANGANAN COVID-19 DI DESA JAWISARI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020-2021

Disusun Oleh
Tiara Candra Wijayanti
1806016071

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 30 Juni 2022 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Dr. Rokhmatul Khoir, M.A
NIP. 19505011005

Penguji I

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

Sekretaris

Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182016011901

Penguji II

Moh. Yamin Darsyah, M.Si
NIP. 198409092019031007

Pembimbing

Muhammad Mahsun, M. A
NIP. 198511182016011901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Tiara Candra Wijayanti menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Resistensi Masyarakat Desa Jawisari Terhadap Kebijakan Penanganan Covid-19 di Desa Jawisari Kabupaten Kendal Tahun 2020-2021 ” merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi serta lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Juni 2022

Yang menyatakan,



Tiara Candra Wijayanti

NIM. 1806016071

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat beserta taufik dan hidayah-Nya. Shalawat juga salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Resistensi Masyarakat Desa Jawisari Terhadap Kebijakan Penanganan Covid-19 di Desa Jawisari Kabupaten Kendal Tahun 2020-2021. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
3. Drs. Nur Syamsudin, M.A., dan Muhammad Mahsun, M.A., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi berbagai pengarahan dan nasehat khususnya dalam hal pelaksanaan perkuliahan.
4. Muhammad Mahsun, M.A., selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, nasihat dan membimbing hingga terciptanya skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Kamsin dan Ibu Susfiyati. Saudara kandung penulis, Fika Wahyu Wijayanti, Bahtiar Lukman Wijaya, dan Zidan Rizky

Wijaya yang telah memotivasi dan mendoakan penulis sehingga skripsi ini selesai sebagaimana mestinya.

8. Kepala Desa beserta perangkat Desa Jawisari dan masyarakat Desa Jawisari yang telah memberikan informasi kepada penulis terkait penulisan skripsi.
9. Rekan-rekan dekat penulis, Ahmad Fauzan, Novandhea Putri Rizkia, Fitri Maesaroh, Aditya Golda Mahardika, Hibatullah Hauzan Hanif, Fildzah Hayyu, Oktantya Dwi, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Rekan-rekan Pangeran Diponegoro Ratu Shima angkatan 27 yang senantiasa mendampingi saya.
11. Seluruh pihak yang membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, Kritik dan saran sangat penulis butuhkan untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Semarang, 15 Juni 2022

Penulis



Tiara Candra Wijayanti

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

*Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta
Alam*

*Saya persembahkan sebuah karya ini untuk diri saya sendiri, kedua orang
tua saya Bapak Kamsin dan Ibu Susfiyati yang telah memberikan seluruh
doa dan*

dukungan serta menyertai saya dalam setiap langkah kehidupan

*Untuk dosen wali sekaligus pembimbing saya, Bapak Muhammad Mahsun,
M.A. yang telah memberikan segala ilmu dan bimbingannya serta motivasi
terbesar agar bisa menjadi orang hebat seperti beliau.*

*Dan untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu
Sosial*

*dan Ilmu Politik prodi Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya untuk
menorehkan sepercik tinta sejarah dan pijakan awal kesuksesan saya di
masa depan*

MOTTO

“Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari seluruh urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya.”

(Umar bin Khattab)

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang signifikan utamanya pada sektor kesehatan dan ekonomi. Hal ini mendorong pemerintah untuk segera mengambil kebijakan pembatasan kegiatan sosial yang dirumuskan dalam kebijakan PSBB dan PPKM dari level 1-4. Kebijakan tersebut banyak mendapatkan perlawanan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Kondisi ini mendorong banyak sarjana untuk menemukan penyebab dari resistensi yang dilakukan masyarakat guna optimalisasi kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan Covid-19. Dengan mengkaji kasus resistensi masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19. Kajian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama Bagaimana Bentuk Resistensi Masyarakat Desa Jawisari Terhadap Himbauan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19? Kedua Mengapa Masyarakat Desa Jawisari Resisten Terhadap Himbauan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19?

Studi ini menggunakan teori resistensi James Scott yang menjelaskan mengenai perlawanan kaum tani akibat dominasi dari kaum proletar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh data mengenai resistensi masyarakat terkait kebijakan penanganan Covid-19 di Desa Jawisari. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi literatur penelitian terdahulu.

Kajian ini menemukan bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jawisari terbagi menjadi tiga bentuk yaitu pertama, resistensi terbuka, yang diartikan sebagai perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat secara sadar di ruang publik dan diketahui oleh semua pihak berupa pengadaan pembelajaran secara luring dan pengadaan kegiatan keagamaan. Kedua resistensi tertutup berupa perlawanan argumentatif yang berupa gossip dan penarikan rasa hormat kepada pemerintah, pelanggaran pemakaian masker dan penolakan vaksinasi yang ketiga adalah resistensi defensif berupa pelanggaran mobilitas. Studi ini juga menemukan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perlawanan tersebut diantaranya tidak mendapatkan BLT-DD, kepedulian terhadap pendidikan, pemenuhan kehidupan sehari-hari, desakan jama'ah, sosialisasi yang kurang efektif serta tenaga kesehatan yang kurang maksimal dalam menangani pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Resistensi, Covid-19, Kebijakan, PPKM, James Scott, Desa Jawisari

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the health sector and the economy. This prompted the government to immediately take a policy of limiting social activities formulated in the PSBB and PPKM policies from levels 1-4. This policy received a lot of resistance in almost all regions in Indonesia. This condition has encouraged many scholars to find the cause of the resistance carried out by the community in order to optimize the policies taken by the government regarding the handling of Covid-19. By reviewing the case of the resistance of the Jawisari Village community to the Covid-19 handling policy. This study seeks to answer two research questions. First, what is the form of resistance of the Jawisari Village Community to the Government's Appeal in Handling the Spread of Covid-19? Second, why are the people of Jawisari Village Resistant to the Government's Appeal in Handling the Spread of Covid-19?

This study uses James Scott's theory of resistance which explains the resistance of the peasants due to the domination of the proletariat. This study uses a qualitative research method with a case study approach to obtain data on community resistance related to Covid-19 handling policies in Jawisari Village. Primary data were obtained from interviews, observations and literature studies of previous studies. This study will use a narrative analysis technique by telling the process of resistance carried out by Jawisari Village during the Covid-19 pandemic in 2020-2021.

This study finds that the forms of resistance carried out by the people of Jawisari Village are divided into three forms, namely first, open resistance, which is defined as resistance carried out by the community consciously in public spaces and known to all parties in the form of violations of wearing masks, providing offline learning, the procurement of religious activities and refuse vaccination. The second closed resistance is in the form of argumentative resistance in the form of gossip and withdrawal of respect for the government, the third is defensive resistance in the form of mobility violations. This study also found that there were several factors behind the resistance, including not getting BLT-DD, concern for education, fulfillment of daily life, community pressure, ineffective socialization and less than optimal health workers in dealing with the Covid-19 pandemic.

Keywords: Resistance, Covid-19, Policy, PPKM, James Scott, Jawisari Village

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN.....	4
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. TINJAUAN PUSTAKA	5
F. METODOLOGI PENELITIAN.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitan.....	9
2. Sumber dan Jenis Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik analisis data.....	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II.....	15
TEORI RESISTENSI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	21
Gambaran Umum Desa Jawisari.....	21
A. Letak Geografis.....	21
B. Demografi	23

C. Struktur Sosial dan Politik	26
D. Struktur Sosial Ekonomi	29
E. Covid-19 di Desa Jawisari	32
BAB IV	38
BENTUK-BENTUK RESISTENSI MASYARAKAT DESA JAWISARI TERHADAP KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19	38
A. Perlawanan Terbuka.....	38
B. Perlawanan Tertutup	46
C. Perlawanan Defensif	53
BAB V	56
FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT DESA JAWISARI RESISTEN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19	56
A. Faktor Penyebab Resistensi Masyarakat Desa Jawisari Terhadap Kebijakan penanganan Covid-19	57
B. Tanggapan Pemerintah Terhadap Masyarakat yang Melakukan Perlawanan.....	68
BAB VI.....	71
PENUTUP	71
A. KESIMPULAN.....	71
Daftar Pustaka.....	74
Lampiran-lampiran	77

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 3. 1 Peta Desa Jawisari</i>	22
<i>Gambar 3. 2 Pelaksanaan iriban (Pembersihan Aliran Irigasi)</i>	31
<i>Gambar 3. 3 Posko Penjagaan Jalan Masuk Dusun Krajan</i>	36
<i>Gambar 3. 4 Posko PPKM Mikro Dusun Krjan RT 01</i>	36
<i>Gambar 3. 5 Kegiatan Membagikan Masker</i>	37
<i>Gambar 3. 6 Proses Penyemprotan Desinfektan ke Rumah-rumah Warga</i>	37
<i>Gambar 4. 1 Warga Mengobrol di Teras Rumah Tetangga Tanpa Menggunakan Masker</i>	49
<i>Gambar 4. 2 Pelaksanaan Pembelajaran Luring TK Bhakti Pertiwi</i>	41
<i>Gambar 4. 3 Kegiatan Literasi : Melukis Menggunakan Batang Pohon Pisang dan Pewarna Makanan</i>	43
<i>Gambar 4. 4 Pelaksanaan Tahlil Ibu-ibu di Dusun Lebari</i>	45
<i>Gambar 4. 5 Pelaksanaan Pengajian Rutin Remaja Dusun Lebari</i>	46

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2. 1 Perbedaan Bentuk Perlawanan</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Jawisari Berdasarkan Usia.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 3. 3 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Jawisari.....</i>	<i>31</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada akhir tahun 2019, dunia digegerkan dengan munculnya penyakit Coronavirus Disease (Covid-19). Virus ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia yang menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang terkonfirmasi dan 3,9 juta kematian per juni 2021 (Perasso, 2021). Di Indonesia sendiri kasus Covid-19 mulai muncul pada tanggal 2 maret 2020, dengan penyebaran cukup massif dimana pada akhir maret 2020, diketahui bahwa Satgas Penanganan Covid-19 mencatat adanya 1.528 kasus warga Indonesia yang positif Covid-19 yang mana ada 136 pasien meninggal dan hanya 81 pasien yang dinyatakan sembuh (Hanum, 2021).

Salah satu diskursus yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat khususnya di Indonesia adalah mengenai penanganan pandemi Covid-19. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah pada awal adanya Covid-19 adalah tidak memberikan kebijakan lockdown (karantina wilayah). Hal ini karena adanya pertimbangan mengenai dampak-dampak yang akan menyerang sektor ekonomi maupun sosial. Sebagai gantinya pemerintah meberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mana yang dimaksud PSBB ialah pemberlakuan pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh penduduk pada wilayah tertentu yang diduga penduduknya telah terpapar virus Covid-19 dalam rangka pencegahan penyebarannya (Syafriada, 2020).

Usai penerapan PSBB, dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 sejak Februari 2021 hingga 2022 pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari level 1-4 (Nurita, 2021). Pemerintah juga memberikan himbauan kepada masyarakat

untuk menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yaitu dengan memakai masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas (Satgas Penanganan Covid-19, 2021)

Meskipun kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ini memiliki dampak yang besar dalam prespektif kesehatan, dimana kebijakan tersebut dapat mengurangi penyebaran Covid-19. Akan tetapi di sisi lain juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan negara diantaranya membuat laju perekonomian melemah. Dalam hal ini masyarakat yang bekerja dalam sektor informal seperti pedagang kaki lima, penjual jasa transportasi, sektor UMKM, rumah makan, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya, mendapatkan dampak yang paling nyata. Untuk tetap menstabilkan perekonomian, diperlukan adanya aktivitas-aktivitas yang mengharuskan interaksi secara langsung sehingga terjadi penurunan produksi yang secara otomatis juga akan berimbas kepada pengurangan tenaga kerja. Sepertialnya kebanyakan perusahaan yang terpaksa harus melakukan PHK terhadap pekerjanya secara besar-besaran, banyak pula usaha UMKM yang mengalami penurunan pendapatan sehingga terpaksa harus tutup (Syafrida, 2020).

Oleh sebab itu, tidak sedikit masyarakat yang kemudian melakukan perlawanan sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan terutama dalam hal mengurangi mobilitas akibat kebutuhan hidup yang mendesak sedangkan tidak ada jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Meskipun telah mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga prokes, namun tidak sedikit masyarakat yang melakukan penolakan terhadap himbauan tersebut terlebih dalam bentuk pemakaian masker, menjauhi kerumunan, hingga beribadah tanpa prokes. Seperti kasus penggunaan masker berdasarkan pemberitaan kompas.com, menjelaskan bahwa terdapat pelanggaran pemakaian masker di DKI Jakarta mencapai 316.754 kasus (Wiryono, 2021).

Selain itu, pelanggaran prokes dalam bentuk membuat kerumunan juga massif dilakukan terutama pada momentum tertentu, seperti halnya kasus yang sempat *viral* pada Juni 2021 silam, dimana salah satu perusahaan makanan cepat saji yaitu McDonald's (McD) meluncurkan menu BTS Meal yang merupakan hasil kolaborasi dengan salah satu boyband ternama asal Korea Selatan yaitu BTS. Ironisnya, antusiasme para fans boyband tersebut mengalahkan kepedulian akan kesehatan dan justru membanjiri gerai McD di beberapa daerah yang berujung pemberian sanksi (Henry, 2021).

Dari beberapa kasus perlawanan masyarakat atas kebijakan penanganan covid di atas, menarik perhatian beberapa sarjana untuk mengkaji topik tersebut diantara kajian yang dilakukan oleh Hidayah (2021), Asharie, dkk (2022) dan Adifirsta (2021). Kajian-kajian tersebut memfokuskan pembahasan pada bagaimana resistensi yang dilakukan masyarakat dalam ruang publik yang berkaitan dengan dampak pada sektor ekonomi. Namun, kajian di atas belum memberikan eksplorasi yang mendalam mengenai bagaimana bentuk-bentuk perlawanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perlawanan tersebut di level *grassroot*. Peneliti tertarik untuk melengkapi kajian tersebut terkait dengan perlawanan masyarakat terhadap kebijakan penanganan Covid-19. Kajian ini akan dilakukan dengan mengangkat kasus yang ada di Desa Jawisari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

Desa Jawisari, merupakan satu dari sekian banyak desa di Indonesia yang melakukan penolakan terhadap himbauan pemerintah mengenai protokol kesehatan sejak awal munculnya virus Covid-19 hingga saat ini. Padahal diketahui pada masa PPKM level 4 yang dilaksanakan pada 16 Juli 2021 hingga 20 Agustus 2021 kasus Covid-19 di Desa Jawisari merupakan yang terbanyak selama masa Pandemi yaitu sebanyak 7 kasus. Desa Jawisari menjadi wilayah dengan kasus terbanyak pula di Kecamatan Limbangan pada periode tersebut. Pemerintah Desa Jawisari sendiri telah mengambil sikap dengan melakukan penanganan melalui penyemprotan disinfektan di rumah orang-orang yang terjangkit virus Covid-19 serta menyediakan fasilitas bagi

masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri. Sedangkan bagi masyarakat luas, pemerintah Desa Jawisari telah menghimbau agar meniadakan segala bentuk kegiatan yang menyebabkan kerumunan, Pemerintah Desa juga membentuk posko PPKM mikro yang bertempat di rumah masing-masing ketua RT di seluruh Desa. Meskipun telah mengetahui fakta tersebut, masih banyak masyarakat Desa yang tetap acuh terhadap himbauan pemerintah, dibuktikan dengan aktivitas keseharian masyarakat dengan mobilitas tinggi, masih tetap rutin mengadakan pengajian, melaksanakan sekolah Madrasah Diniyah bahkan tidak sedikit warga yang menggerombol di warung atau teras rumah dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa menggunakan masker.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bentuk-bentuk resistensi masyarakat Desa Jawisari terhadap himbauan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19. Selain itu peneliti juga hendak mengkaji perihal kondisi-kondisi yang mempengaruhi atau membentuk sikap dan perilaku mengapa masyarakat Desa Jawisari melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah. Kajian ini penting dilakukan untuk mengungkap hubungan antara masyarakat dengan negara terkait sejauh mana masyarakat dapat kooperatif dengan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar pada fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Bentuk Resistensi Masyarakat Desa Jawisari Terhadap Himbauan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 ?
2. Mengapa Masyarakat Desa Jawisari Resisten Terhadap Himbauan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 ?

C. TUJUAN

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak di capai dalam penenlitian ini ialah :

1. Untuk Mengetahui Bentuk-bentuk Resistensi yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Jawisari Terhadap Himbauan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19
2. Untuk Mengetahui Alasan Dibalik Resistensi Masyarakat Desa Jawisari Terhadap Himbauan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penulisan Skripsi ini terdapat dua manfaat yang nantinya akan didapatkan, diantaranya :

1. Manfaat Teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan wawasan mengenai resistensi masyarakat terhadap pemerintah khususnya dalam hal penanganan Covid-19.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang di masa mendatang hendak melakukan penelitian dengan tema pembahasan resistensi masyarakat terhadap penanganan Covid-19.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan khususnya oleh pemerintah Desa Jawisari untuk mengatasi masalah masyarakat yang resisten terhadap himbauan pemerintah mengenai penanganan Covid-19.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan peneliti perihal kasus pelanggaran kebijakan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti merujuk pada kajian-kajian yang telah dilakukan terlebih dahulu. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai resistensi publik terhadap negara di Indonesia. Dari beberapa

kajian itu dapat dikelompokkan pada dua tema. Yaitu tema tentang resistensi terhadap pembangunan dan resistensi terhadap kebijakan terkait Covid-19.

1. Resistensi Masyarakat terhadap Pembangunan

Studi yang membahas mengenai perlawanan masyarakat yang disebabkan oleh proyek pembangunan dari pemerintah maupun pemilik modal diantaranya disusun oleh Panca (2011), Aji dan Martinus (2020), Hadi dan Eka (2019), Arifin (2017), Yuwono (2010), Pramudita, dkk (2020), dan Wawan, dkk (2021). Panca (2011) secara umum menjelaskan mengenai perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat pedagang Pasar Sumber Arta adalah perlawanan tertutup seperti berkata kasar, menggerutu serta dengan sengaja tidak menghadiri pertemuan. Panca juga menyebutkan bahwa faktor penyebab resistensi itu sendiri ialah janji pembangunan pasar yang belum terealisasi, intimidasi dari pengelola pasar, serta wadah penyaluran aspirasi tidak berfungsi. Sedangkan dalam penelitian Yunowo (2010) didapati bahwa masyarakat yang kontra terhadap rencana pembangunan pabrik tersebut melakukan perlawanan terbuka dengan aksi-aksi massa seperti demonstrasi, pemasangan spanduk, pagelaran budaya, dan mediasi. Rencana pembangunan Semen Gersik yang memanfaatkan sumber daya alam di wilayah pegunungan kendeng memunculkan kekhawatiran bagi warga utamanya yang bekerja pada sektor pertanian akan adanya kerusakan lingkungan yang berujung hilangnya mata pencaharian masyarakat. Meskipun demikian pemerintah daerah tetap merealisasikan pembangunan pabrik tersebut dengan mengabaikan segala resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedumulyo.

Penelitian Hadi dan Eka (2019) memaparkan bahwa masyarakat Gunung Talang telah melakukan unjuk rasa, membuat baliho, bermalam di depan pintu masuk proyek, mencari dukungan masyarakat luas melalui media massa hingga yang paling ekstrem adalah pembakaran satu unit mobil milik PT. Hitay Daya Energy. Hal-hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan atas rencana pembangunan proyek geothermal yang masih asing bagi masyarakat.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Arifin (2017) menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bulu Kerto juga melakukan resistensi melalui aksi-aksi massa seperti tiga penelitian sebelumnya. Tidak hanya demonstrasi, masyarakat juga melayangkan gugatan terhadap pembangunan Hotel kepada Pengadilan Negeri Malang. Hal ini disebabkan karena pembangunan Hotel The Rayja dilakukan sekitar 150m dari Umbul Gemulo yang mana hal tersebut bertentangan dengan Perda Kota Batu yang membahas mengenai pelestarian daerah resapan air agar sumber dayaair tetap terjaga. Keputusan pemerintah yang mengambang juga turut andil menjadi alasan bagi masyarakat melakukan resistensi secara terus-menerus.

Kajian lain juga dilakukan oleh Aji dan Martinus (2020) menggambarkan bahwa resistensi yang dilakukan masyarakat Ujungnegoro adalah bentuk perlawanan terbuka dan tertutup. Pembangunan PLTU yang digadang-gadang dapat meningkatkan laju ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Batang, nyatanya berkebalikan. Masyarakat beranggapan bahwa penyaringan tenaga kerja justru lebih memihak kepada warga luar Desa. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudita, dkk (2020) memeparkan bahwa penanganan banjir oleh pemerintah berfokus pada infrastruktur sungai sehingga barujung pada penggusuran rumah warga yang berada di bantaran sungai ciliwung. Program normalisasi yang dicanangkan oleh pemerintah DKI Jakarta mendapatkan perlawanan dari masyarakat dengan mengungkapkan ketidaksetujuan lewat gossip, menyudutkan pihak tertentu serta melakukan pelanggaran pendirian bangunan melawati batas perizinan. Resistensi Masyarakat Adat Kesapuhan Bayah yang dikaji oleh Wawan, dkk (2021) disebabkan oleh pembangunan PT. Cemindo Gemilang di wilayah sakral yang diyakini Masyarakat sebagai tempat peristirahatan leluhur. Sehingga kerusakan akibat pembangunan tersebut dikhawatirkan dapat merusak ekologi dan tatanan budaya yang mereka anut. Perlawanan masyarakat Adat Bayah dilakukan secara konsisten dan terprogram dalam bentuk demonstrasi dan

penanaman pohon secara terus menerus. Namun, pihak pabrik tetap tidak kooperatif sehingga masyarakat harus angkat kaki dari tanah adatnya.

2. Resistensi Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Covid-19

Sedangkan kajian yang menjadi acuan peneliti mengenai resistensi masyarakat yang muncul di era pandemi Covid-19 ialah kajian dari Hidayah (2021), Asharie, dkk (2022) dan Adifirsta (2021). Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah menjelaskan bahwa keterlambatan Pemerintah Kampung Pulau Derawan dalam menanggapi aturan pembukaan destinasi wisata menyebabkan masyarakat melakukan resistensi berupa memeberikan teguran dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, mensiasati regulasi prokes, dan mencari waktu untuk melewati pengecekan berkas prokes. Begitu pula dengan kajian Asharie dkk yang menjelaskan bahwa para nelayan di Desa Cilincing melakukan perlawanan dengan tetap melaut diluar jam yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) karena desakan ekonomi. Kehidupan sebagian besar masyarakat menjadi bergantung kepada bantuan dari pemerintah yang nyatanya tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Adifirsta memaparkan bahwasannya masyarakat dalam hal ini pengusaha Cafe merasa bahwa Pemerintah tidak mengayomi namun justru terkesan memusuhi disebabkan oleh pemberlakuan PPKM yang membatasi mobilitas dan jam operasional Cafe yang hanya diperbolehkan buka hingga waktu yang ditentukan dengan sanksi berat apabila melakukan pelanggaran. Untuk tetap dapat mempertahankan bisnisnya, pemilik Cafe melakukan perlawanan berupa menggosip, mengkritik melalui platform media sosial, dan juga buka melewati batas waktu operasional.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa resistensi yang dilakukan oleh masyarakat adalah salah satu cara agar dapat tetap bertahan hidup sebagaimana biasanya. Hal ini disebabkan perubahan

kondisi secara tiba-tiba yang berdampak kepada kehidupan masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan perlawanan. Beberapa kajian mengenai Resistensi masyarakat terhadap pembangunan yang berujung pengusiran di atas menjelaskan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan upaya mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Sedangkan resistensi yang timbul akibat kebijakan penanganan Covid-19 dilakukan karena sesuatu yang sangat mendesak, yaitu untuk bertahan hidup. Dalam pembahasan kedua tema tersebut belum mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu peneliti ingin menguatkan bahasan tersebut dengan fokus kepada apa saja perlawanan yang dilakukan masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19 pada kehidupan sehari-hari serta mencari keterangan mengenai penyebab perlawanan tersebut. Kajian ini juga akan mengungkap hubungan antara masyarakat dengan Negara terkait sejauh mana masyarakat dapat kooperatif dengan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, seorang peneliti memerlukan metode penelitian sebagai dasar penulis dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang disusun guna mendapatkan gambaran tentang resistensi masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19, maka metode yang menurut penulis tepat digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini tidak hanya menjawab secara sekilas mengenai suatu masalah melainkan dapat menjelaskan secara detail mengenai mengapa dan bagaimana masalah tersebut ada maupun diselesaikan. Kualitatif merupakan sebuah metode untuk mengetahui dan memahami secara menyeluruh dan mendalam tentang pandangan individu atau kelompok dalam ranah sosial dan kemanusiaan.

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji yakni perlawanan masyarakat Desa Jawisari berupa pelanggaran-pelanggaran kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah, maka pendekatan yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan suatu penjelajahan dari beragam kasus melalui data yang dikumpulkan secara terperinci yang didapat dari banyak sumber informasi. Wahyuningsih (2013) juga menyatakan bahwa pendekatan studi kasus tidak digunakan untuk mendapatkan generalisasi melainkan memahami secara maksimal tentang kasus yang dikaji dalam kurun waktu yang fleksibel.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam menulis penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yang akan dijadikan baham dalam memperkuat kajian data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari objek utama penelitian yaitu masyarakat Desa Jawisari selain itu diperoleh juga dari pihak-pihak lain seperti perangkat Desa, dan tenaga kesehatan. Sedangkan data sekunder ialah data pendukung data primer yang diperoleh melalui data dari pihak-pihak lain yang telah dipublikasikan seperti jurnal penelitian, buku, artikel, berita dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian resistensi masyarakat terhadap kebijakan Covid-19.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data merupakan suatu langkah penting dalam melakukan penelitian. Hal ini disebabkan karena sebuah penelitian dapat dilakukan apabila peneliti mendapatkan data pendukung guna keperluan penelitian. Mengumpulkan data-data tersebut dapat melalui beberapa cara seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan percakapan secara langsung berupa tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber terkait kasus yang sedang dikaji dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan oleh peneliti. Percakapan tersebut memiliki maksud untuk mengetahui informasi yang dimiliki oleh objek yang bersangkutan.

Peneliti memilih wawancara untuk mengelola data karena teknik ini sangat memungkinkan narasumber untuk bebas menyajikan pandangan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri (Harrison, 2009). Sehingga narasumber merasa lebih nyaman untuk menjawab setiap detail pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti. Narasumber yang nantinya akan diwawancarai adalah Kepala Desa, pejabat Desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, beberapa masyarakat Desa Jawisari yang melakukan resistensi terhadap himbauan pemerintah Desa mengenai penanganan Covid-19.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan yang menjadi fondasi peneliti dalam memperoleh temuan yang berasal dari objek penelitian. Morris dalam (Hasanah, 2016) mendefinisikan observasi sebagai sebuah pergerakan yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data lapangan melalui pencatatan suatu gejala dengan menggunakan bantuan berupa instrument dan merekamnya dengan tujuan ilmiah. Selain itu observasi juga dijabarkan merupakan kesan yang didapatkan oleh peneliti tentang wilayah yang sedang diteliti berdasarkan kemampuan dasar manusia. Peneliti telah melakukan observasi secara mendalam sebelum penyusunan proposal dimana peneliti terlibat langsung melakukan pengamatan terhadap bentuk-bentuk perlawanan yang terjadi di Desa Jawisari terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 serta faktor-faktor penyebab perlawanan tersebut. Peneliti juga mengobservasi kehidupan masyarakat Desa Jawisari untuk memahami struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik desa agar dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah peneliti sampaikan.

c. Dokumen dan Literatur

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat menunjang penelitian seperti profil Desa Jawisari, dokumen tentang covid di Desa Jawisari, penanganan Covid-19, berita-berita, serta pengambilan gambar praktek-prakter perlawanan masyarakat. Hal ini bertujuan guna membantu penulis dalam penelitian sebagai data pendukung dalam analisis terhadap objek yang akan dikaji peneliti. Teknik selanjutnya ialah dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur bertujuan guna menganalisis teori yang berkaitan dengan resistensi penanganan Covid-19 yang bersumber dari beberapa media cetak seperti majalah, surat kabar, buku, dan lain sebagainya.

4. Teknik analisis data

Setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen dan literatur. Data tersebut akan melewati tahapan analisis secara mendalam, analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan selama turun langsung ke lapangan merupakan suatu hal yang penting dalam proses penelitian. Adapun teknik analisis data yang akan penulis gunakan ialah teknik analisis menurut Creswell (2017). Terdapat enam tahapan analisis dalam riaset kualitatif yang disampaikan oleh Creswell. Tahapan awal dari teknik analisis ini ialah mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, literatur dan lain sebagainya. Langkah yang kedua adalah membaca keseluruhan data tersebut dengan mencatat inti-inti dari data yang telah didapatkan, selanjutnya adalah *coding* data yang ada dalam hasil pengumpulan data dengan proses mengolah informasi menjadi segmen-segmen tulisan. Selanjutnya adalah penerapan proses coding untuk mendeskripsikan empat hal yaitu ranah, orang atau partisipan, kategori dan tema yang akan dianalisis, langkah yang ke lima adalah menyajikan data dalam bentuk laporan kualitatif, Hal ini dilakukan setelah data terdisplay atau tersusun, sehingga peneliti menjadi lebih mudah memahami data-data yang

telah diperoleh, dan yang terakhir ialah meng-interpretasi atau memaknai data dengan menarik kesimpulan yang membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan melalui interpretasi dari penulis itu sendiri.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan dibagi ke dalam enam bab, setiap bab merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini peneliti akan memaparkan hal-hal pokok yang dimulai dari alasan yang menjadi latar belakang penelitian, dilanjutkan dengan merumuskan rumusan permasalahan. Selain itu terdapat pula uraian mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan. Pendahuluan ini juga hendak menjabarkan mengenai metode dan pendekatan penelitian yang digunakan, juga terdapat teori, konsep serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TEORI RESISTENSI

Di dalam kerangka teori akan dijelaskan kembali dengan lebih detail mengenai teori resistensi masyarakat yang telah dimunculkan pada proposal sebelumnya. Teori tersebut kemudian menjadi kerangka berpikir peneliti dalam menganalisis hasil dari data yang telah didapatkan selama penelitian dilakukan.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA JAWISARI

Dalam bagian ini akan menggambarkan secara umum mengenai Desa Jawisari yang menjadi lokasi penelitian. Meliputi letak geografis, demografi, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik Desa.

BAB IV POLA PERLAWANAN MASYARAKAT DESA JAWISARI TERHADAP KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19

Pada bab pembahasan awal peneliti akan menyampaikan mengenai regulasi kebijakan penanganan Covid-19. Selain itu, peneliti akan

menyampaikan mengenai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Jawisari dalam menekan angka persebaran Covid-19. Kemudian menjabarkan pola perlawanan yang dilakukan masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19 melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat.

BAB V FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RESISTENSI MASYARAKAT

Pada Bab V ini akan diuraikan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Jawisari resisten terhadap himbuan pemerintah dalam menanganani penyebaran Covid-19 serta tindakan yang diambil pemerintah Desa Jawisari dalam menanganani masyarakat yang resisten terhadap kebijakan penanganan Covid-19.

BAB VI PENUTUP

Dalam Bab terakhir penelitian ini, penulis akan memberikan kesimpulan jawaban dari keseluruhan data yang dihasilkan dalam penelitian. Selain itu penulis juga menyampailan saran guna penelitian serupa yang akan dilakukan mendatang.

BAB II

TEORI RESISTENSI

Dalam rangka mengkaji pola dan mengungkap akar resistensi masyarakat di Desa Jawisari dalam konteks kebijakan penanganan Covid-19, penulis menggunakan kajian teori resistensi atau politik perlawanan yang digagas oleh James Scott dalam bukunya yang berjudul *Perlawanan Kaum Tani* dan teori yang sama yang dikembangkan oleh beberapa sarjana berikutnya. Studi resistensi sebenarnya bukan hal baru secara teoritis. Studi yang dibangun oleh James Scott cukup kompleks karena menggabungkan beberapa tradisi teoritis diantaranya kontroversi politik yang berhungan dengan Negara dan masyarakat dan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kaum proletar kepada kaum borjuis dalam kehidupan sehari-hari.

Resistensi merupakan pemikiran yang terletak diantara pemikiran Marxisme dan antropologi simbolik yang memiliki maksud untuk menjadi jalan tengah atas dua pemikiran tersebut. Akhir tahun 1980-an resistensi menjadi primadona dalam menyelidiki kasus-kasus empiris. Resistensi sendiri dianggap bersifat kultural karena memanifestasikan dirinya dalam ekspresi dan perilaku sehari-hari masyarakat (Panca, 2011). James Scott mendefinisikan resistensi sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh klien kepada patron yang mengambil kebijakan cenderung merugikan klien (Scott, 1993). Sedangkan resistensi menurut Ahmad Fauzie Ridwan dalam penelitian *Servatius* merupakan sebuah perlawanan yang menjadi reaksi terhadap adanya perubahan mendasar dalam suatu fenomena (Servatius, 2019). Menurut Barnard dan Jonathan resistensi ini sebenarnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat lemah, seperti buruh yang berada pada struktur bawah terhadap pihak kuat yang berada pada struktur atas seperti penguasa maupun pengusaha (Suriadi, 2008).

Perlawanan sering kali merupakan tindakan atas dominasi yang dibentuk oleh kaum-kaum penguasa atau pemilik modal. Kecemasan publik akan kehilangan haknya membawa masyarakat bersatu untuk melakukan aksi berupa

gerakan-gerakan yang ditujukan untuk melawan pemerintah maupun pemilik modal. James Scott telah mengabadikan bagaimana warga hidup dalam kesehariannya, mengenai sejarah serta perlawanan yang kaum tani lakukan terhadap tuan tanah karena turut andilnya negara dan agen perusahaan. Perlawanan petani di Asia Tenggara menunjukkan bahwa penindasan yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk mahalny biaya sewa tanah karena berkewajiban membayar untuk tuan tanah dan pajak negara. Kebutuhan subsisten memaksa petani untuk bersedia menjual tanah miliknya hingga satu persatu hak atas tanah pada daerah tersebut menjadi milik perorangan. Hubungan antara patron-klien yang awalnya bersifat mutualisme berubah drastis ketika pasar mulai dikuasai oleh paham kapitalis, paham ini kemudian memunculkan kelas-kelas dalam masyarakat. Bagi yang memiliki modal untuk bertahan dan yang tidak, tentu akan sulit mengembangkan usahanya, sedangkan petani mengembangkan pertanian hanya untuk menghidupi keluarganya daripada mencari keuntungan yang maksimal. Ketika petani menjual tanahnya dan bekerja untuk pemilik tanah yang kaya atau menjadi penyewa, di sinilah ketimpangan sosial terjadi (Scott, 1993).

Posisi kaum tani yang makin lemah tidak hanya menimbulkan ketergantungan yang eksploitatif dalam desa, tetapi juga membuat keberadaan kaum tani dalam sistem stratifikasi desa yang normal pada masyarakat agraris menjadi semu. Ketergantungan akibat hilangnya kepemilikan atas tanah menjadikan pola hubungan patron-klien yang tadinya untuk melindungi menjadi menindas dengan memberikan harga sewa yang terlampau tinggi. Negara yang diharapkan menjadi salah satu tempat perlindungan bahkan justru ikut memberikan pajak yang begitu memberatkan petani (Scott, 1993).

James Scott menggambarkan dengan jelas tentang perlawanan dan penolakan masyarakat minoritas lemah berhadapan dengan pemilik tanah dan pemerintah yang berkuasa. Perlawanan tersebut dibagi ke dalam dua bentuk yaitu perlawanan terbuka (*public transcript*) yang secara tipikal mendominasi kajian yang membahas mengenai perlawanan yaitu dengan tindakan yang terorganisir seperti melakukan pemberontakan bersama kelompok tertentu yang dalam

beberapa kasus memiliki nama atau lembaga yang bertujuan untuk mengubah kebijakan atau melengserkan jabatan penguasa. Secara historis studi perlawanan telah melalui tahap yang sama dengan studi tentang kekuasaan; fokus awal pada bentuk perlawanan yang lebih jelas dan dramatis, dan kemudian pengenalan artikulasi yang halus dan tersebar. Studi awal berfokus pada bentuk perlawanan publik, terorganisir secara kolektif, konfrontatif dan kekerasan terhadap kekuasaan negara, kapitalisme, dan dominasi seperti studi revolusi dengan fokus yang kuat pada kelompok revolusioner bersenjata, serta studi gerakan sosial dengan perhatiannya pada demonstrasi besar-besaran, protes atau kerusuhan. Bidang kontemporer lebih beragam, namun masih didominasi oleh fokus pada konfrontasi publik dan kolektif (Scott, 1993).

Pemberontakan atau *bughat* dalam khazanah keislaman dianggap sebagai dosa besar, sehingga para ulama sangat hati-hati dalam mengkategorikan pemberontakan itu sendiri. *Bughat* diartikan sebagai sebuah tindakan melawan kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan hingga senjata berdasar pada suatu alasan (Rustam, 2016). Islam pada dasarnya memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpinnya, hal tersebut terdapat pada Q.S. Annisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Annisa :59)

Prinsip mengenai ketaan merupakan satu hal yang penting dalam suatu negara, prinsip tersebut digunakan untuk menjaga tatanan sosial agar tidak mengancam negara. Dalam menghadapi pemimpin yang dzalim, Nabi Muhammad Saw meminta umatnya untuk tetap bersabar dan tidak melakukan pemberontakan. Hal tersebut tertuang dalam HR. Muslim dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu'anh:

يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ
رَجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ
وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

Artinya:

”Akan ada sepeninggalku para penguasa yang tidak meneladani petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku, dan akan muncul diantara mereka (para penguasa) orang-orang yang hati-hati mereka adalah hati-hati setan dalam jasad manusia.” Aku (Hudzaifah) berkata, “Bagaimana aku harus bersikap jika aku mengalami hal seperti ini?” Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, “Engkau tetap dengar dan taat kepada pemimpin itu, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, maka dengar dan taatlah.” (HR. Muslim dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu'anh)

Mengangkat senjata dan inisiatif melakukan perlawanan bersenjata terhadap Pemerintahan Islam tidak hanya berentuk larangan. Namun, Islam menyebut bahwa aksi ini merupakan sebuah wujud dari kekafiran. Islam menyatakan bahwa perlawanan tersebut merupakan hasutan dan kezaliman dimuka bumi, yang mana tidak akan membawa dampak baik dari perlawanan tersebut selain timbulnya kekacauan dan kerusakan sosial (Rustam, 2016).

Scott mencoba mengembangkan fokus perlawanan ke dalam bentuk yang berbeda yaitu perlawanan tertutup (*hidden transcript*) yang merupakan perlawanan yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak yang

biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki power untuk melawan secara terbuka. Scott menjelaskan bahwa perlawanan ini adalah perlawanan yang paling cocok dilakukan oleh kaum tani di Malaysia karena mereka tidak memiliki kebebasan untuk bicara mengungkapkan pikiran-pikiran mereka di hadapan penguasa. Kelompok-kelompok subordinat ini kemudian menciptakan percakapan-percakapan (discourse) yang merepresentasikan kritik terhadap kekuasaan, yang diungkapkan secara sembunyi-sembunyi di belakang kelompok penguasa (kelompok dominan). Scott menggambarkan suatu bentuk perlawanan ideologis (ideological resistance) dari kelompok subordinat, seperti berupa gosip (gossip), bentuk umpatan, memunculkan sikap yang berlawanan dari kebiasaan dan lain sebagainya (Scott, 1993).

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai perbedaan perlawanan terbuka dan tertutup tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 1 Perbedaan Bentuk Perlawanan

Perlawanan Terbuka	Perlawanan Tertutup
Terorganisir, sistematis, dan kooperatif	Tidak terorganisir, tidak sistematis, dan individual
Berprinsip/ tanpa pamrih	Bersifat untung-untungan dan berpamrih
Mempunyai akibat-akibat revolusioner	Tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner
Mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri	Dalam maksud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada

Sumber: Buku Perlawanan Kaum Tani karya James Scott

Sedangkan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Douglas dan Waskler, mengemukakan bahwa ada 4 model-model perlawanan. diantaranya

yang pertama ialah perlawanan terbuka, yaitu merupakan perlawanan yang dapat disaksikan seperti perkelahian, demonstrasi, dan konflik. Kemudian yang kedua merupakan perlawanan tersembunyi, perlawanan ini biasanya diwujudkan dengan perilaku mengancam baik dari umpatan, gunjingan dan ungkapan ketidaksetujuan terhadap sesuatu. Ketiga, perlawanan agresif yakni perlawanan yang dilakukan dengan memiliki maksud untuk mendapatkan hasil. Keempat ialah perlawanan defensif, yakni perlawanan yang dilakukan sebagai tindakan untuk melindungi diri sendiri (Santos, 2002).

Scott menggambarkan faktor penyebab resistensi masyarakat ialah transformasi tanah menjadi komoditas yang dijual telah mempunyai efek mendalam bagi petani. Kontrol terhadap tanah semakin lepas dari tangan-tangan masyarakat pedesaan, petani secara progresif kehilangan hak-hak kebebasan, hak-hak guna hasil dan menjadi penyewa serta petani yang bekerja pada tuan tanah kaya. Nilai-nilai yang diproduksi semakin diukur oleh fluktuasi pasar yang tidak menentu. Studi Scott menunjukkan hilangnya hak kaum tani atas tanah disebabkan oleh perubahan pasar yang dikuasai kapitalistik. Pemilik lahan kecil sering bergantung pada elit bertanah misalnya untuk urusan pembelian benih, peralatan, transportasi dan pemasaran serta kadang-kadang kebutuhan kredit. Dengan begitu pemilik lahan kecil akan berhutang pada pemilik lahan besar yang lama kelamaan kehilangan tanahnya karena tidak mampu membayar hutang pada elit bertanah. Setelah kehilangan tanah sudah tentu mereka akan mengabdikan dan bekerja pada tuan tanah atau menyewa tanah untuk bercocok tanam demi mencukupi kebutuhan subsisten mereka. Tingginya biaya sewa dan pajak menggerakkan para petani untuk memberontak karena ketidakadilan tersebut telah merusak moral ekonomi petani yang mengolah tanah untuk kelangsungan hidup keluarganya bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya (Scott, 1993).

BAB III

Gambaran Umum Desa Jawisari

Untuk mengetahui resistensi masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19, penting kiranya peneliti memberikan gambaran mengenai lokasi yang menjadi tempat penelitian. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok yang menjadi reaksi atas suatu hal/peristiwa tidak terlepas dari perubahan kehidupan pada wilayah tersebut. Oleh sebab itu pada bab 3 ini peneliti akan menggambarkan potret lokasi penelitian melalui penjelasan letak geografis dan juga menjabarkan mengenai demografis serta perubahan struktur sosial-politik dan sosial-ekonomi serta perkembangan Covid-19 yang ada di Desa Jawisari berdasarkan data dari sumber-sumber terpercaya yang dapat dibuktikan keasliannya.

A. Letak Geografis

Desa Jawisari merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Llimbangan, Kabupaten Kendal, Povinsi Jawa Tengah. Desa Ini memiliki wilayah seluas 147,5 Ha yang dikelompokkan dalam bentuk tanah kering yaitu pemukiman dan fasilitas umum seluas 96,9 Ha, serta tanah basah atau luas sawah 50,5 Ha. Desa Jawisari berada di lereng gunung ungaran dan termasuk ke dalam wilayah dataran tinggi dengan curah hujan rata-rata 1500 mm pertahun dan suhu rata-rata 25°C – 32 °C (Profil Desa Jawisari). Adapun Desa Jawisari berbatasan langsung dengan :

Sebelah Timur : Desa Gonoharjo
Sebelah Barat : Desa Margosari
Sebelah Utara : Desa Ngesrepbalong
Sebelah Selatan : Desa Pagerwojo

Sebagaimana digambarkan pada peta administratif Desa Jawisari berikut.

Gambar 3. 1 Peta Desa Jawisari



Sumber : Monologi Desa Jawisari

Berdasarkan sejarah yang telah dikisahkan secara turun termurun oleh para sesepuh Desa, awal mula terbentuknya Desa Jawisari tidak terlepas dari terbentuknya Desa Praja pada tahun 1927. Dikisahkan bahwasannya pada zaman dahulu ada dua Desa bernama Desa Lebari dan Desa Jawirati, yang kemudian menyatu dalam proses yang bernama (Blengketan) dan mendapatkan nama Desa Jawisari yang mana nama tersebut diambil dari dua nama desa sebelumnya. Meskipun demikian, saat ini secara administratif Desa Jawisari terdiri dari 2 Dusun yaitu krajan dan Lebari yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadus). Dimana tiap Dusun memiliki 4 Rukun Tetangga (RT) (Wawancara, Djarwadi, 3 Juni 2022).

Secara administratif, Desa Jawisari dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan umum kepala Desa setiap lima tahun sekali. Dalam

menjalankan pemerintahannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa berdasarkan tugas dan fungsi tiap-tiap bagiannya, yaitu sekertaris desa, kaur keuangan, kasi perencanaan, kasi pemerintahan, dan dua kepala dusun. Pusat pemerintahan Desa berada di balai Desa Jawisari yang terletak di Dusun Krajan.

Desa Jawisari termasuk Desa yang terletak cukup jauh dari hiruk pikuk perkotaan meskipun masih tergolong ramai karena dilewati oleh jalan menuju tempat wisata pemandian air panas Gonoharjo. Untuk menuju Desa Boja yang menjadi pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan wilayah Singorojo, Boja, Limbangan (Siboli), jarak yang harus ditempuh adalah 8,4 km atau 15-20 menit menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan untuk mencapai wilayah kota semarang harus menempuh jarak 31km dengan waktu 50-60 menit menggunakan kendaraan bermotor. Meskipun demikian, jalan menuju Desa Jawisari sudah terbilang memadai dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2. Selain itu, untuk sampai di Desa Jawisari juga dapat menggunakan transportasi umum seperti angkot dan ojek (Observasi, Juli 2021).

B. Demografi

1. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kendal tahun 2021, jumlah penduduk Desa Jawisari mencapai 1179 jiwa. Dengan presentasi laki-laki 50,89% dan perempuan 49,11 yaitu 600 Jiwa dan 579 jiwa dan jumlah kepala keluarga 394. Berikut merupakan pembagian penduduk yang diklasifikasikan kedalam beberapa kategori:

- a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Jawisari Berdasarkan Usia

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	0 - 4	47	3,99	39	3,31	86	7,29
2	5 - 9	49	4,16	50	4,24	99	8,40
3	10 - 14	55	4,66	53	4,50	108	9,16
4	15 - 19	41	3,48	33	2,80	74	6,28
5	20 - 24	49	4,16	45	3,82	94	7,97
6	25 - 29	44	3,73	39	3,31	83	7,04
7	30 - 34	45	3,82	53	4,50	98	8,31
8	35 - 39	51	4,33	50	4,24	101	8,57
9	40 - 44	49	4,16	48	4,07	97	8,23
10	45 - 49	37	3,14	31	2,63	68	5,77
11	50 - 54	35	2,97	35	2,97	70	5,94
12	55 - 59	39	3,31	29	2,46	68	5,77
13	60 - 64	17	1,44	29	2,46	46	3,90
14	65 - 69	19	1,61	17	1,44	36	3,05
15	70 - 74	9	0,76	9	0,76	18	1,53
16	>= 75	14	1,19	19	1,61	33	2,80
JUMLAH		600	50,89	579	49,11	1.179	100,00

Sumber : (Data agregat kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Kendal tahun 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya penduduk Desa Jawisari didominasi oleh usia remaja yaitu 10-14 tahun berjumlah 108 jiwa dan paling sedikit yaitu usia 70-74 tahun berjumlah 18 jiwa. Data ini juga menggambarkan angka beban tanggungan yakni 66% penanggung beban yang diperankan oleh masyarakat usia produktif yaitu umur 15-64 tahun berjumlah 799 jiwa dan 32,2% beban yang ditanggung yaitu masyarakat usia tidak produktif umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas 380 jiwa.

2. Tingkat Pendidikan

Menurut Edgar Dalle, pada dasarnya pendidikan tidak hanya berasal dari lembaga-lembaga pendidikan resmi yang didirikan oleh pemerintah maupun perorangan, tetapi juga pendidikan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masa mendatang (Niswanti, 2019). Dalam pendidikan formal terjadi proses pengembangan dan pengarahan kemampuan yang dimiliki seseorang secara terprogram dan disengaja. Sehingga semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, semakin banyak pula proses pengembangan dan pengarahan yang dilalui dan didapatkan seseorang yang dapat mempengaruhi persepsi mereka.

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN AKHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	Tidak/Belum Sekolah	188	15,95	169	14,33	357	30,28
2	Belum Tamat SD/Sederajat	34	2,88	49	4,16	83	7,04
3	Tamat SD/Sederajat	147	12,47	150	12,72	297	25,19
4	SLTP/Sederajat	106	8,99	102	8,65	208	17,64
5	SLTA/Sederajat	99	8,40	84	7,12	183	15,52
6	Diploma I/II	0	0,00	1	0,08	1	0,08
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	4	0,34	6	0,51	10	0,85
8	Diploma IV/Strata I	19	1,61	18	1,53	37	3,14
9	Strata II	3	0,25	0	0,00	3	0,25
10	Strata III	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUMLAH		600	50,89	579	49,11	1.179	100,00

Sumber : (Data agregat kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Kendal tahun 2021)

Berdasarkan data dari table di atas, menunjukkan bahwa masyarakat yang lulus SLTA dan jenjang di atasnya hanya 19,8% dari keseluruhan penduduk sedangkan sisanya mayoritas lulusan SD sederajat. Chairul Anwar (2017) dalam

bukunya Teori-teori pendidikan menyatakan bahwa manusia akan berkembang dan menentukan kejiwaannya sendiri berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungannya. Oleh sebab itu pendidikan juga kemudian menentukan bagaimana cara masyarakat Desa Jawisari memahami kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.

C. Struktur Sosial dan Politik

Dahulu, Desa Jawisari di kenal sebagai desa islami di Desa Sekitar. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar masyarakat Desa Jawisari dapat mengaji dengan baik didukung dengan fasilitas pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah (MDA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) serta kualitas pengajar yang mumpuni. Hal ini bahkan sampai menarik masyarakat luar desa untuk menyekolahkan anaknya dalam bidang pendidikan agama di Desa Jawisari (Wawancara, Kamsin 23 Mei 2022). Namun, seiring berjalannya waktu nilai-nilai keislaman yang dijunjung oleh masyarakat Desa Jawisari berangsur memudar Sehingga pemerintah Desa Jawisari merumuskan visi dan misi yang sesuai dengan identitas asli masyarakat Desa Jawisari yaitu masyarakat religius islam. Berikut visi dan misi tersebut (Profil Desa Jawisari) :

Visi

"Membangun Desa Bersama Rakyat Untuk Kemajuan Desa Jawisari Yang Beriman Dan Bermartabat"

Misi

1. Membangun Kesejahteraan Masyarakat
2. Menjadikan Desa Jawisari yang beriman dan berakhlakul karimah
3. Menjadikan kembali Desa Jawisari sebagai panutan di bidang keagamaan diantara desa sekitar
4. Meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam pelayanan masyarakat dan transparan disegala bidang
5. Mengedepankan Musyawarah dan azaz ketertiban dalam hal penentuan kebijakan desa

6. Menggali kembali dan melestarikan adat istiadat para pendhulu di Desa Jawisari dengan mempertimbangkan aspek keagamaan.

Kesamaan atas agama yang dipercaya dan realita bahwa masyarakat Desa Jawisari mayoritas masih memiliki hubungan persaudaraan satu sama lain, seharusnya menjadi modal besar untuk dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Namun yang terjadi justru sebaliknya, jika dulu ada sambatan yaitu gotong royong untuk membantu warga yang sedang membangun rumah, saat ini sudah tidak berlaku dan menggunakan jasa tukang bangunan. Sama juga dengan kerja bhakti pembangunan desa kalau tidak ada upah maka tidak jalan. Hal ini disampaikan oleh Djarwadi selaku Kepala Desa Jawisari:

“Wong saiki kui opo-opo kudu ono duite, mbien meh bangun dalan, gapuro angger dikongkon yo langsung mangkat. Nek saiki lak yo takon upahe piro?” (Orang sekarang itu apa-apa harus ada uangnya, dulu kalau mau membangun jalan, gapura di perintah langsung dilaksanakan. Kalau sekarang pasti menanyakan upahnya berapa?) (Wawancara, Djarwadi, 3 Juni 2022)

“Memang saiki opo-opo butuh duit, tapi jenenge bangun Deso lak yo kanggo awake dewe to. Mosok yo kerjo kanggo awake dewe rak gelem” (Memang sekarang apa-apa butuh uang, tapi namanya membangun desa kan ya untuk kita semua. Masa ya kerja untuk dirinya sendiri tidak mau) lanjutnya.

Selain itu, masyarakat Desa Jawisari juga telah mengalami banyak perubahan dalam kehidupan politik. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi juga perkembangan pendidikan politik yang diterima, masyarakat Desa Jawisari menjadi lebih mengerti bagaimana harus bertindak dalam ranah perpolitikan. Misalnya dalam hal memilih calon pemimpin. Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, masyarakat Desa Jawisari pada dasarnya mayoritas memiliki hubungan persaudaraan yang cukup dekat. Sehingga, kedekatan hubungan persaudaraan tersebutlah yang menjadi penentu siapa kemudian yang akan di pilih semakin dekat maka semakin besar kemungkinan akan dipilih (Wawancara, Ellsa, 16 Mei 2022). Lambat laun, pemikiran tersebut mulai berangsur memudar dan digantikan dengan pemikiran baru yang mengedepankan kualitas pemimpin terutama pada bagaimana cara calon tersebut berkomunikasi

dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Aji dan Rokhayati selaku orang yang bekerja dalam pemerintahan:

“Sekarang orang Desa sudah pintar-pintar, mereka sudah paham pemimpin yang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka juga sudah sadar bahwa apa yang dia pilih akan menentukan kehidupan mereka mendatang” (Wawancara, Aji, 2 Juni 2022)

“iya, benar. Meskipun belum sepenuhnya, tapi masyarakat Desa Jawisari sudah banyak berubah dalam perilaku politiknya” (Wawancara, Rokhayati, 2 Juni 2022)

Masyarakat Desa Jawisari juga mulai bisa memilah tindakan apa yang kemudian harus diambil ketika mendapati pemimpin pilihannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jawisari sudah mulai kritis dan peka terhadap fenomena politik yang terjadi di sekitar mereka. Sifat kritis inilah yang kemudian mendorong masyarakat Desa Jawisari mengkritik kinerja pemerintah desa apabila tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Karena turut andil dalam pengambilan keputusan kebijakan melalui musyawarah dusun maupun desa, masyarakat kurang lebih paham mengenai arah perencanaan yang seharusnya sehingga dapat melakukan kritik tersebut dengan dasar. Namun, cara penyampaian kritik inilah yang menurut peneliti belum tepat karena tidak disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan tetapi hanya berwujud omongan di belakang.

“Warga mbien kuwi yen Lurah e ndue kehendak ora ono sing bakal wani ngelawan, podo meneng-meneng wae. Nek saiki opo wae sing dilakoni lurah mesti di koreksi. Sayange leh ngomong ora langsung ning ngarep” (Warga dulu itu ketika Lurah memiliki suatu kehendak tidak ada yang berani belawan, mereka hanya diam-diam saja (menurut). Kalau sekarang apa saja yang dilakukan oleh lurah pasti di koreksi. Sayangnya pembicaraan tersebut tidak disampaikan di depan) (Wawancara, Djarwadi, 3 Juni 2022)

Meskipun mesyarakat Desa Jawisari seluruhnya beragama islam, Desa Jawisari merupakan desa yang netral yang tidak didominasi oleh partai-partai tertentu termasuk partai berbasis agama islam. Sehingga mereka akan cenderung

mendukung calon yang melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat Desa Jawisari.

D. Struktur Sosial Ekonomi

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa Kabupaten Kendal tahun 2019 yang terdapat pada lampiran (Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2019), Desa Jawisari termasuk ke dalam golongan Desa yang maju. Hal tersebut didukung dengan angka kemiskinan yang tergolong rendah yaitu 86 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk 1.179 jiwa. Selain itu perbandingan angka tanggungan juga turut andil dalam penggolongan Desa Jawisari sebagai desa yang maju dimana penanggung beban dan beban yang ditanggung memiliki presentase 66% dan 32%.

Awalnya mayoritas penduduk Desa Jawisari bermata pencaharian sebagai seorang petani dengan hasil pertanian utamanya dalam bentuk nira/getah aren. Hasil panen tersebut kemudian diolah oleh perorangan menjadi gula aren dan diperjual belikan di wilayah desa. Menurut Yanah, sebagai petani gula aren. Gula aren termasuk bahan dapur yang berharga cukup mahal, saat ini untuk satu kilogram gula aren murni harganya mencapai 21 ribu rupiah di wilayah desa dan 30 ribu rupiah di wilayah kota Semarang (Wawancara, Yanah, 25 Mei 2022).

Apabila dilihat dari potensinya, penjualan gula aren terhitung sangat menguntungkan, namun kembali lagi tergantung bagaimana cara mengelolanya. Pendistribusian gula aren tersebut sebenarnya pernah mengalami peningkatan pada tahun 2018 ketika ada program yang dijalankan oleh peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Diponegoro yang mendistribusikan gula aren tersebut di toko-toko yang lebih besar di daerah Semarang seperti Indomaret dan Alfamart. Namun program tersebut tidak berjalan dengan waktu yang lama. Setelah itu pendistribusian kembali kelajur awal dan hanya ada beberapa pemborong yang memang datang dari kota untuk membeli gula aren untuk di jual kembali atau sebagai oleh-oleh.

Selain itu, hasil pertanian lain yang dihasilkan oleh petani Desa Jawisri ialah beras, jagung, kopi, tebu, yang berkualitas dengan luas tanah sawah dan sumber perairan yang memadai sangat mendukung. Zaman dulu, masyarakat Desa Jawisari melakukan beberapa budaya yang menurut mereka dapat menjaga kesejahteraan desa seperti sedekah desa hingga baritan untuk penolakan bala. Namun seiring berjalannya waktu sebagian masyarakat mulai menyadari bahwa hal tersebut termasuk menyimpang dari ajaran agama mereka yaitu islam. Sehingga kemudian budaya tersebut hanya diterapkan oleh perorangan saja yang memang masih percaya terhadap tradisi tersebut. Meskipun demikian, ada satu budaya yang tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa hingga saat ini, yang menunjang proses pertanian yaitu *iriban*. *Iriban* merupakan sebuah kegiatan pembersihan air irigasi yang dilakukan oleh warga laki-laki di sungai sronto. Kegiatan ini dilakukan agar air yang mengalir ke sawah warga tetap terjaga kebersihannya sehingga hasil panen juga tetap sesuai sebagaimana mestinya. Selain membersihkan aliran irigasi masyarakat juga memasak di lokasi tersebut dan memakannya pula di sana sebagai bentuk rasa syukur mereka. (Wawancara, Suldi 22 Mei 2022)

Gambar 3. 2 Pelaksanaan iriban (Pembersihan Aliran Irigasi)



Sumber : Dokumentasi pribadi 22 Januari 2021

Saat ini mata pencaharian penduduk Desa Jawisari makin beragam. Ditunjukkan pada table berikut ini :

Tabel 3. 3 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Jawisari

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Karyawan Swasta	239
2	Petani	128
3	Pegawai Negeri Sipil	12
4	Wiraswasta	133
5	Lain-lain	96

Sumber : (Data agregat kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Kendal tahun 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian terbanyak di Desa Jawisari masih petani, namun buruh pabrik juga tidak kalah banyaknya. Banyak warga usia remaja yang kemudian memilih untuk bekerja di pabrik yang ada di Boja maupun Semarang karena menganggap bahwa pekerjaan tersebut lebih mudah dibandingkan harus mengurus sawah. Meski sudah dikategorikan sebagai desa yang maju, mental mayoritas masyarakat Desa Jawisari tergolong masih mental penerima, ketika ada tetangga yang mendapatkan bantuan maka ada beberapa orang yang juga menuntut hal tersebut padahal tidak sesuai dengan kualifikasi yang diajukan (Wawancara, Rokhayati, 2 Juni 2022). Hal ini yang kemudian juga menjadi perhatian pemerintah Desa Jawisari untuk berusaha agar pemikiran tersebut dapat berubah yaitu tidak lagi bergantung kepada bantuan melainkan menciptakan peluang untuk memberikan kesejahteraan secara menyeluruh.

E. Covid-19 di Desa Jawisari

Sejak awal munculnya Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020, Desa Jawisari menjadi salah satu wilayah hijau yang menandakan nol kasus Covid-19. Meskipun demikian, pemerintah Desa Jawisari tetap mengambil kebijakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kendal untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Hingga pada tanggal 13 Juni 2020 untuk pertama kalinya ada warga yang terdeteksi terpapar virus Covid-19. Esti selaku bidan desa menyampaikan kemungkinan penyebab warga tersebut dapat terpapar adalah pekerjaannya yang mengharuskan pasien tersebut kontak langsung dengan banyak orang yang sedang sakit atau bahkan sudah terpapar Covid-19 (Wawancara, Esti, 2 Juni 2022). Setelah itu, kasus-kasus lain mulai bermunculan hampir bersamaan. Kurang lebih ada 33 warga yang terkonfirmasi terpapar virus Covid-19 selama kurun waktu 6 bulan pada tahun 2020 (Data Covid Desa Jawisari).

“Warga Jawisari banyak banget yang terpapar saat varian delta tahun 2020 itu mbak, pokoknya 20 lebih. Itupun yang terkonfirmasi belum orang-orang yang bergejala tapi tidak mau swab pasti lebih banyak lagi” (Wawancara, Esti, 2 Juni 2022).

Awal tahun 2021 Covid-19 mulai mereda baik nasional maupun di Desa Jawisari, sehingga kegiatan-kegiatan sosial yang tadinya dihentikan mulai kembali diadakan. Hal tersebut tak bertahan lama, pasalnya pada Maret 2021 kasus-kasus Covid-19 mulai bermunculan kembali. Meskipun kasus Covid-19 di Desa Jawisari pada 2021 tidak sebanyak tahun 2020 yaitu sebanyak 24 kasus yang terkonfirmasi selama kurun waktu 1 tahun, namun pada tahun ini terdapat satu warga yang meninggal dunia akibat Covid-19. Bahkan pada bulan Juli 2021 Desa Jawisari menjadi Desa dengan kasus tertinggi se-kecamatan Limbangan yaitu 7 kasus. Mungkin 7 kasus bagi sebagian orang adalah angka yang kecil, namun bagi Kecamatan Limbangan yang selama ini menjadi wilayah zona hijau angka tersebut cukup besar. Apalagi Desa Jawisari termasuk desa kecil di Kecamatan Limbangan (Wawancara, Djarwadi, 3 Juni 2022).

Dalam rangka mengurangi angka persebaran virus Covid-19 pemerintah Desa Jawisari mengambil beberapa kebijakan. Kebijakan awal yang diambil oleh pemerintah Desa Jawisari yang berdasar pada surat edaran Bupati Kendal pada 30 Maret 2020 adalah pemberlakuan satu jalan masuk (Gapura Setiap Dusun) dengan menutup akses jalan lainnya dengan membuat tenda semi terbuka sebagai posko. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendata warga yang keluar masuk desa. Selain itu, posko tersebut juga digunakan sebagai pos pengendalian kesehatan dengan melakukan penyemprotan desinfektan kepada siapa saja yang masuk Desa Jawisari dengan memperhatikan standart kesehatan.

Karena peningkatan kasus Covid-19 terus saja terjadi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong para kepala daerah membuat aturan kewajiban memakai masker bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kendal kemudian mengambil tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 yang kemudian menjadi dasar Pemerintah Desa Jawisari dalam mengambil kebijakan. Kebijakan pertama yang diambil pemerintah Desa

Jawisari berdasarkan peraturan Bupati tersebut tertuang dalam pasal 5 yaitu kewajiban menggunakan masker. Seluruh masyarakat Desa Jawisari diwajibkan menggunakan masker ketika sedang berkegiatan di luar rumah baik itu untuk bekerja, berkegiatan sosial dan lain sebagainya. Masih dengan dasar yang sama kebijakan selanjutnya adalah kewajiban menjaga jarak fisik, jarak yang dimaksud di sini adalah sejauh 1,5 meter. Kebijakan-kebijakan tersebut apabila tidak dipenuhi maka ada sanksi administratif berupa teguran, pembubaran kegiatan, dan melaksanakan kerja sosial (Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020).

Selain beberapa kebijakan di atas, Pemerintah Desa Jawisari juga mengeluarkan kebijakan dalam sektor pendidikan. Di Desa jawisari sendiri terdapat 4 sekolah formal yaitu TK Bhakti Pertiwi, PAUD KB Tunas Bangsa, SDN Jawisari dan MTs NU 26 Manbaul Hikmah dan sekolah non formal yang berbasis keagamaan yaitu 2 MDA dan 1 TPQ. Sejak awal diterbitkannya surat edaran Gubernur Jawa Tengah pemerintah Desa Jawisari sudah memberikan himbauan kepada Kepala Sekolah yang bertanggung jawab atas masing-masing sekolah untuk meniadakan segala bentuk pembelajaran tatap muka hingga waktu yang ditentukan untuk menurunkan resiko penularan Covid-19 pada *cluster* pendidikan.

Pemerintah Desa Jawisari juga melakukan beberapa langkah untuk mencegah masyarakat terjangkit virus Covid-19 diantaranya:

1. Penyemprotan desinfektan

Pemerintah Desa Jawisari mengambil tindakan dengan menyemprotkan cairan desinfektan secara menyeluruh dalam beberapa periode, selanjutnya penyemprotan disinfektan tersebut dilakukan di tempat-tempat umum dan wilayah rumah warga. yang terpapar Covid

2. Membagikan masker, handsanitizer, sabun cuci tangan dan tempat cuci tangan
3. Melakukan Sosialisasi Mengenai Covid-19

Pemerintah Desa Jawisari melakukan sosialisasi secara *online* melalui *WhatsApp Group* sebagai alat komunikasi mengenai pengetahuan tentang Covid-19 sedangkan secara *offline* melalui kegiatan susur desa.

4. Membentuk Posko PPKM Mikro tingkat RT

Pemerintah Desa Jawisari menempatkan posko PPKM mikro di rumah-rumah ketua masing-masing RT. Pembuatan posko ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 dimana fungsi dari posko PPKM mikro ini adalah sebagai pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa atau Kelurahan.

5. Menyediakan Rumah Isolasi Mandiri untuk Warga yang Terpapar Virus Covid-19

Sebelum ada rumah isolasi Desa, masyarakat baik yang terindikasi maupun sudah positif terpapar virus Covid-19 melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan dilakukan pengecekan secara berkala dari pihak pemerintah dengan tenaga kesehatan. Namun setelah diwajibkan oleh Bupati Kendal, bahwa seluruh Desa harus memiliki minimal masing-masing satu rumah isolasi, maka Desa Jawisari kemudian menjadikan salah satu kelas di SD Jawisari sebagai rumah isolasi bagi warga yang terpapar virus Covid-19.

6. Memberikan Bantuan BLT-DD

Pemberian bantuan langsung tunai yang berasal dari Dana Desa atau disebut BLT-DD dilakukan pemerintah Desa Jawisari guna mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19. Yang mana dana tersebut diperoleh dengan mengalihkan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan yang dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa yang diterima desa atau lebih dari 35% dengan persetujuan dari pemerintah Kabupaten/Kota (Wawancara, Amin, 25 Mei 2022).

Gambar 3. 3 Posko Penjagaan Jalan Masuk Dusun Krajan



Sumber : Dokumentasi Kelompok Remaja Yasin Jawisari

Gambar 3. 4 Posko PPKM Mikro Dusun Krajan RT 01



Sumber : Dokumentasi Pribadi Agustus 2021

Gambar 3. 5 Kegiatan Membagikan Masker



Sumber : Instagram Story Lintas Generasi Lebari

https://instagram.com/lintas_generasi_lebari_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Gambar 3. 6 Proses Penyemprotan Desinfektan ke Rumah-rumah Warga



Sumber : Instagram Story Lintas Generasi Lebari

https://instagram.com/lintas_generasi_lebari_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

BAB IV

BENTUK-BENTUK RESISTENSI MASYARAKAT DESA JAWISARI TERHADAP KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19

Pembahasan yang disajikan dalam Bab IV ini ialah menjawab pertanyaan penelitian pertama yaitu mengenai bagaimana bentuk resistensi masyarakat Desa Jawisari terhadap himbauan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19. Sejak merebaknya virus Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020, hampir tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jawisari. Masyarakat cenderung takut dan patuh dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah demi kemaslakhatan bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, pada akhir tahun 2020 perlawanan-perlawanan berupa pelanggaran terhadap kebijakan mulai muncul dan semakin bertambah di tahun 2021. Meskipun sudah dihadapkan dengan kenyataan bahwa ada bentuk nyata orang sekitar yang terpapar Covid-19, hasil observasi menunjukkan tidak semua warga mematuhi peraturan tersebut. Ketidapatuhan warga terhadap kebijakan penanganan Covid-19 terjadi setiap hari dan di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar ruangan. Peneliti menggolongkan perlawanan tersebut ke dalam tiga kategori yaitu perlawanan terbuka, perlawanan tertutup, dan perlawanan defensif yang masing-masing akan dikaji lebih dalam pada bab ini.

A. Perlawanan Terbuka

James Scott membagi perlawanan ke dalam dua bentuk. Yaitu perlawanan terbuka dan tertutup. Perlawanan terbuka merupakan tindakan yang terorganisir seperti melakukan pemberontakan bersama kelompok tertentu yang memiliki tujuan untuk mengubah kebijakan atau melengserkan jabatan pemangku kebijakan yang secara tipikal mendominasi studi tentang perlawanan (Scott, 1993).

Pada hakikatnya, perlawanan masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19 tidak memiliki sesuatu yang terdapat dalam sejarah khas konflik pedesaan. Meskipun perlawanan dilakukan oleh masyarakat secara sadar di ruang publik dan diketahui oleh semua pihak, tetapi tidak ada kekacauan, demonstrasi, pembakaran, kejahatan sosial yang terorganisasi, maupun kekerasan secara terbuka melainkan pengambilan keputusan terorganisir yang melanggar kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Perlawanan-perlawanan tersebut diantaranya:

1. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada sektor pendidikan. Pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi menjadi terhambat (Massie, 2021). Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang menjadi tumpuan dalam keberlangsungan hidup umat manusia umumnya dan kemajuan Negara khususnya. Oleh sebab itu pemerintah tetap mencari solusi agar pembelajaran dapat tetap berlangsung. Berakar dari definisi kebijakan menurut James Anderson yang memaparkan kebijakan sebagai suatu langkah/tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seorang aktor berkenaan dengan masalah atau persoalan tertentu yang tengah dihadapi (Wahab, 2015), di mana tujuan kebijakan tersebut adalah terselesaikannya suatu masalah dengan tindakan, maka dalam menyikapi dampak pandemi dalam sektor pendidikan ini, kebijakan pemerintah tentu memegang peran yang sangat penting, hingga kemudian munculah kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) / pembelajaran daring yang merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan, dan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020.

Peraturan mengenai peniadaan kegiatan pembelajaran secara luring yang diganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) telah disampaikan baik melalui pihak pemerintah Desa maupun dari Dinas Pendidikan Kecamatan Limbangan. Kamsin, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Limbangan meyakini

bahwa pemberitahuan mengenai perubahan kegiatan belajar-mengajar telah disampaikan kepada seluruh kepala sekolah di semua jenjang pendidikan melalui WA Grup yang telah dibuat sebelumnya guna koordinasi. Informasi tersebut dimaksudkan agar Kepala Sekolah mengambil kebijakan untuk segera menyampaikan perubahan tersebut kepada rekan guru dan peserta didik (Wawancara, Kamsin, 23 Mei 2022).

Pelanggaran terhadap kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan secara luring dilakukan oleh TK Bhakti Pertiwi. Setelah mendapatkan informasi kaitannya dengan pemberlakuan belajar daring, TK Bhakti Pertiwi mengikuti aturan tersebut dengan melakukan kegiatan belajar-mengajar melalui pertemuan online pada *platform Zoom meeting*. Selain itu pihak sekolah juga membuat WA Grup yang beranggotakan para guru dan wali murid siswa. Grup tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menyampaikan materi biasanya dalam bentuk video pembelajaran atau foto-foto kegiatan yang harus dilakukan sekaligus berfungsi sebagai wadah pengumpulan tugas (Wawancara, Warti, 2 Juni 2022).

Pada awal tahun 2021, beredar wacana mengenai kembalinya pembelajaran luring meskipun dengan pembatasan kapasitas siswa membawa sedikit angin sejuk bagi para pengajar, siswa dan orang tua siswa yang selama ini kesulitan selama pembelajaran daring. Akan tetapi pada bulan Mei 2021 sebelum tahun ajaran baru sekolah dimulai virus Covid-19 dengan varian baru dari luar negeri yakni Alpha, Beta dan Delta merebak di Indonesia dan mengakibatkan pemerintah kembali mengambil kebijakan mengenai pembatasan kegiatan dengan nama baru yaitu PPKM (Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat yang otomatis membatalkan pelaksanaan sekolah luring. Kurang efektifnya pembelajaran yang dilakukan di atas, membuat Warti sebagai Kepala Sekolah TK Bhakti pertiwi menggunakan program baru yaitu '*Home Visit*'. *Home Visit* merupakan program yang dijalankan dengan cara mengumpulkan siswa maksimal berjumlah 5 anak dan mengunjungi rumah siswa yang dijadikan tempat pembelajaran untuk memberikan pembelajaran secara langsung dengan batasan waktu 30 menit (Wawancara, Warti, 2 Juni 2022).

Metode *Home Visit* dinilai masih kurang efektif karena perbandingan antara murid dengan pendidik yang tidak seimbang sehingga Warti kembali mengambil kebijakan untuk melakukan pembelajaran secara luring. Kebijakan yang diambil oleh Warti merupakan kesepakatan antar guru yang dilakukan secara langsung di kantor TK Bhakti Pertiwi sedangkan dengan wali murid dikoordinir lewat *WhatsApp Group* (Wawancara, Warti, 2 Juni 2022). Setelah kesepakatan diambil, Warti mengumpulkan siswa berdasarkan wlayahnya yaitu Dusun Krajan, Dusun Lebari dan Dusun Cemangklek yang dilakukan secara bergilir di rumah salah satu siswa. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat Desa Jawisari namun bersifat tersembunyi bagi Dinas Pendidikan Kecamatan Limbangan. sehingga Warti mengintruksikan kepada seluruh wali murid untuk tidak memposting kegiatan tersebut di media sosial.

Gambar 4. 1 Pelaksanaan Pembelajaran Luring TK Bhakti Pertiwi



Sumber : Dokumentasi Kepala Sekolah TK Bhakti Pertiwi

Perlawanan tersebut sempat diketahui oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Limbangan sehingga Kamsin selaku kepala dinas pendidikan Kecamatan

Limbangan bersama-sama dengan pengawas TK/SD dan kepala Desa Jawisari melakukan peninjauan ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Setelah membubarkan kegiatan pembelajaran Kamsin memberikan sanksi berupa teguran langsung dan menyampaikan himbauan agar tidak lagi mengulang pelanggaran peraturan tersebut tanpa adanya surat peringatan (Wawancara, Kamsin, 23 Mei 2022).

Selain itu, kegiatan sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan di Dusun Lebari yaitu Literasi juga masih tetap menjalankan kegiatannya. Literasi merupakan program kerja remaja Dusun Lebari untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak sekitar Dusun Lebari berupa pembelajaran formal hingga pembelajaran yang menunjang bakat dan minat anak. Ellsa selaku pengurus program Literasi tersebut menyatakan bahwa kegiatan Literasi sempat diliburkan dalam waktu yang cukup lama karena Covid-19 dan kembali di gelar pada awal tahun 2021 hingga saat ini (Wawancara, Ellsa, 16 Mei 2022).

Seperti yang sudah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, pada bulan Juli 2021 masyarakat Desa Jawisari yang terkonfirmasi terpapar Virus Covid-19 berjumlah 7 orang. Jika literasi dimulai pada awal tahun 2021 dan sampai saat ini belum diliburkan kembali, berarti ketika kasus Covid-19 di Desa Jawisari melonjak mereka mengetahui informasi tersebut. Meskipun demikian kegiatan Literasi tetap berjalan secara rutin yaitu setiap minggu pagi bertempat di TPQ atau di lapangan sepak bola Desa dengan menerapkan prokes. Menurut peneliti hal tersebut dapat membahayakan anak-anak yang ikut serta dalam program karena tidak ada pengawasan dari pihak yang lebih paham mengenai penerapan prokes, meskipun tidak ditemukan kasus anak yang terpapar Covid-19 selama kegiatan literasi berlangsung.

Gambar 4. 2 Kegiatan Literasi : Melukis Menggunakan Batang Pohon Pisang dan Pewarna Makanan



Sumber : Dokumentasi Pribadi Agustus 2021

2. Tetap Melakukan Kegiatan Keagamaan

Jika dilihat dari keadaan sosial dan budayanya, Desa Jawisari memiliki potensi untuk melakukan perlawanan terbuka sebagaimana yang disampaikan oleh Scott. Sebagai desa yang menjunjung tinggi ajaran agama dalam kehidupan kesehariannya, agama sudah pasti menjadi faktor determinan di Desa Jawisari, dimana tokoh agama menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentu dapat menjadi modal besar bagi pemuka agama untuk mengkoordinir masyarakat melakukan pemberontakan kepada pemerintah agar dapat mengubah kebijakan yang ada atau mendapatkan kekuasaan.

Merebaknya virus Covid-19 mendorong pemerintah Desa Jawisari untuk meniadakan segala bentuk kegiatan sosial maupun keagamaan termasuk kegiatan tahlil tersebut. Hal ini dilakukan guna memutus rantai persebaran virus Covid-19 melalui kerumunan. Meskipun tidak melakukan pemberontakan hingga kekerasan secara terbuka, masyarakat Desa Jawisari melakukan tindakan pelanggaran kebijakan dengan melakukan budaya keagamaan berupa pengumpulan massa yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Jawisari yaitu tahlilan rutin yang digolongkan ke dalam empat kategori yaitu tahlilan yang dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra dan remaja putri. Kegiatan tersebut dilaksanakan sekali setiap satu pekan secara bergilir di rumah-rumah warga. Materi dalam tahlil tersebut juga beragam, seperti membaca yasin dan tahlil, membaca manaqib, membaca surat Al-Waqiah, hingga dziba'an (Wawancara, Susfiyati 3 Juni 2022).

Pengambilan keputusan tanpa adanya andil dari pemerintah desa menurut peneliti menjadi salah satu bentuk perlawanan terbuka yang memenuhi kriteria perlawanan terbuka pertama menurut Scott yaitu terorganisir, sistematis dan kooperatif. Dimana pelaksanaan kembali kegiatan pengajian rutin dilakukan tanpa melalui musyawarah resmi melainkan obrolan-obrolan santai antar warga. Informasi mengenai tetap diadakannya kegiatan pengajian tersebut kemudian dikoordinir langsung oleh masyarakat setempat dengan menyampaikannya melalui mulut ke mulut dan *WhatsApp Group* (Wawancara, Zulaikhah 16 Mei 2022).

Polanya hampir sama, ketika masyarakat melihat kondisi sudah tidak segenting sebelumnya mereka langsung mengambil tindakan untuk kembali melakukan kegiatan tahlil tersebut. Yang menjadi permasalahan kegiatan tersebut tetap berjalan meskipun pemerintah desa kembali menghimbau untuk tidak membuat kegiatan yang mengumpulkan massa karena kasus di desa yang melonjak pada sekitar bulan Juli-Agustus 2021. Hal tersebut dibenarkan oleh tokoh agama Dusun Lebari yaitu Zulaikhah "*Nggih, Mbak. Tahlile ora libur wes mangkat meneh, tapi aku tetep menghimbau warga untuk tetep nganggo masker*" (Ya Mbak, Ngajinya tidak libur, sudah berangkat kembali. Tapi saya tetap menghimbau warga untuk tetap memakai masker). (Wawancara, Zulaikhah 16

Mei 2022). Dan Ellsa selaku pengurus remaja Dusun Lebari “*Masio ora libur, tapi dewe tetep prokes kok Mbak*” (Walaupun tidak libur tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan kok) (Wawancara, Ellsa, 16 Mei 2022).

Hal ini berbeda dengan observasi yang telah peneliti lakukan pada Agustus 2021. Masyarakat yang melakukan tahlil masih banyak yang tidak menggunakan masker, Kemudian tidak disediakan tempat cuci tangan maupun handsanitizer, selain itu pada beberapa kasus ada kalanya rumah warga yang menjadi lokasi tahlil tidak cukup luas sehingga tidak ada ruang untuk menjaga jarak bahkan cenderung desak-desakan.

Gambar 4. 3 Pelaksanaan Tahlil Ibu-ibu di Dusun Lebari



Sumber : Dokumentasi Pribadi Agustus 2022

Gambar 4. 4 Pelaksanaan Pengajian Rutin Remaja Dusun Lebari



Sumber : Dokumentasi Pribadi 28 Agustus 2022

B. Perlawanan Tertutup

Bentuk perlawanan kedua yang diagagas oleh James Scott adalah perlawanan tertutup. Perlawanan ini dikatakan tertutup karena aksinya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang belum tentu orang tersebut sadar telah melakukan perlawanan. Sebagaimana kriteria perlawanan tertutup yang digambarkan Scott, perlawanan tertutup yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jawisari tidak terorganisir dan bersifat individual dimana perlawanan tersebut bersifat insidental, berpamrih, tidak memiliki akibar revolusioner dan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap sistem dominasi yang ada. Konsep ini sama dengan konsep perlawanan tersebar yang diusulkan oleh Mona Lilja dan Stellan Vinthagen dalam *Journal of Political Power* yang menyatakan bahwa :

“Perlawanan ini mungkin dilakukan oleh satu (atau beberapa) individu atau muncul sebagai praktik perlawanan yang tidak terorganisir yang dilakukan oleh banyak aktor di tempat-tempat yang tersebar. Dalam kasus terakhir, perlawanan yang tersebar dapat memiliki dampak besar, dan mengubah masyarakat, komunitas, bangsa, atau bahkan seluruh wilayah” (Lilja, 2018).

Perubahan yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan perilaku yang memungkinkan untuk masyarakat lain diseluruh penjuru wilayah Indonesia melakukan perlawanan serupa. Apabila hal tersebut terjadi maka akan semakin sulit bagi pemerintah untuk mengendalikan laju penyebaran virus Covid-19. Berikut bentuk-bentuk resistensi tersebut:

1. Tidak Menggunakan Masker Ketika Berada di Tempat Terbuka

Penggunaan masker merupakan salah satu bagian terpenting dalam pencegahan penularan Covid-19 utamanya ketika melakukan kontak langsung. Masker dapat melindungi diri manusia dari virus yang menular sedikit banyak melalui tetesan yang keluar dari hidung atau mulut. Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020, Pemerintah Desa Jawisari mengambil kebijakan wajib memakai masker. Seluruh masyarakat Desa Jawisari diwajibkan menggunakan masker ketika sedang berkegiatan di luar rumah baik itu untuk bekerja, berkegiatan sosial dan lain sebagainya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut pemerintah Desa Jawisari kemudian membuat program permbagian masker dan alat-alat kesehatan lainnya seperti handsanitizer, sabun cuci tangan dan tempat cuci tangan secara berkala. Masker yang dibagikan disesuaikan dengan penghuni tiap-tiap rumah. Awalnya masker yang diberikan adalah masker kain yang dipesan dari salah satu penjahit yang ada di Dusun Krajan. Namun, setelah adanya informasi dari kementrian kesehatan mengenai penggunaan masker kain yang justru rentan terpapar virus maka dialihkan dengan membagikan masker medis. Hal tersebut disampaikan oleh Mukhlisin selaku Sekertaris Desa :

“Kita awal covid 2020 itu bagi masker kain pesen di Mbak Muhim jadi pake jasanya buat bantu usahanya. Tapi setelah ada informasi dari kementrian kesehatan yang memberitakan bahwa masker kain malah bahaya kami ganti bagikan masker medis...” (Wawancara, Mukhlisin, 25 Mei 2022)

Hal tersebut mendapat respon positif dari masyarakat seperti yang disampaikan oleh masyarakat yang menerima *“Nah nek ono pembagian masker*

karo handsanitizer ngene kan dewe dadi kebantu” (Wawancara, Sumiyati, 6 Juni 2022). “Lumayan banget Mbak, ngirit pengeluaran..” (Wawancara, Muna, 4 Juni 2022). Selama melakukan observasi, peneliti menemukan tidak sedikit masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah. Zidan salah satunya, Ia mengaku pernah membayar denda sejumlah 50 ribu rupiah lantaran tidak memakai masker ketika perjalanan pulang dari Boja.

“Padahal udah mau sampai rumah, aku kena razia di daerah Margosari kena denda 50 ribu, untung bawa uang lebih. Gak lagi-lagi deh keluar gak pake masker. Mana tetangga-tetangga pada tau, asli malu banget aku tiap hari dicengin” (Wawancara, Zidan 25 Mei 2022).

Hal serupa disampaikan juga oleh Fildha yang terkena razia berbarengan dengan Zidan di tempat yang sama:

“Aku ketemu juga sama Zidan di sana sama-sama lagi kena. Aku kaget tiba-tiba mobil di depan berhenti, kukira kenapa ternyata lagi ada razia masker. Aku lihat kok ada yang nyanyi pancasila kukira itu sanksinya ternyata suruh bayar denda masing-masing 50 ribu, mana aku lagi sama adek aku, 100 ribu melayang. Sayang banget bisa buat beli kebutuhan lain. Tapi gak papa aku jadiin pelajaran. Setelah itu, mau sedekat apa tempatnya aku tetep pake masker” (Wawancara, Fildha 27 Mei 2022)

Berdasarkan pengalaman dari kedua narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi merupakan salah satu hal yang efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran agar tidak kembali melakukan pelanggaran tersebut. Bagi sebagian warga yang sempat terkena razia layaknya Zidan dan Fildha atau minimal mendengar kabar bahwa telah dilakukan razia masker oleh pihak Satpol-PP Kecamatan Limbangan, wajarnya orang tersebut akan lebih hati-hati dengan tetap menggunakan masker ketika keluar rumah. Namun, karena masyarakat merasa razia tersebut tidak mungkin sampai ke dalam pemukiman warga (Wawancara, Suripah 27 Mei 2022), maka mereka tetap tidak menggunakan masker misalnya ketika berbelanja ke warung kelontong di sekitar rumah warga atau berbelanja sayuran di tukang sayur langganan mereka. Selain itu, Mereka juga berkumpul di teras rumah salah satu warga dan berinteraksi tanpa menggunakan masker.

Perlawanan tersebut mereka lakukan dalam kehidupan kesehariannya, namun ketika memenuhi undangan pemerintah misalnya dalam kegiatan musyawarah bersama perangkat, maka mereka akan menggunakan masker. Baik masyarakat secara luas maupun perangkat desa sudah sama-sama mengetahui perihal perlawanan tersebut, namun memang tidak ada tindakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka menangani kasus tersebut. Peneliti beranggapan penggunaan masker ketika kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan yang bercampur dengan perasaan takut diberi sanksi baik dalam bentuk uang ataupun sanksi sosial, karena mereka sedang berada dalam forum resmi. Meskipun pemerintah Desa Jawisari sendiri tidak memberlakukan sanksi selain teguran kepada masyarakat yang melanggar. Peneliti menilai cara tersebut kurang efektif, karena sanksi berupa peringatan hanya akan dituruti ketika sanksi itu diberikan, tetapi akan kembali mengulang setelahnya.

Gambar 4. 5 Warga Mengobrol di Teras Rumah Tetangga Tanpa Menggunakan Masker



Sumber : Dokumentasi Pribadi, Agustus 2021

2. Menolak Vaksinasi Covid-19

Pemberian vaksin tidak lain sebagai upaya pemerintah menjaga kesehatan masyarakat, dan bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat corona-19, mencapai kekebalan kelompok dimasyarakat, dan untuk melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Permenkes 23 tahun 2018, vaksinasi merupakan sebuah kegiatan pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Upaya pemberian vaksin oleh pemerintah dianggap sebagai salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari penularan covid-19, namun oleh sebagian masyarakat pemberian vaksin tersebut ada yang menerima dan ada yang menolak, bagi masyarakat yang menolak tentu mempunyai alasan tersendiri seperti takut, ragu akan keamanan dan kehalalan dari vaksin yang diberikan. Sebagai jawaban atas keragu-raguan, ketakutan masyarakat akan vaksin yang digunakan, pemerintah telah membuat pernyataan bahwa vaksin yang digunakan aman, selain itu badan pengawas obat dan makanan telah memberikan persetujuan penggunaan vaksin, kemudian sudah ada fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 yang menyatakan vaksin Covid-19 hukumnya suci dan halal, selain itu Presiden Joko Widodo telah mengumumkan jika vaksinasi akan diberikan secara gratis.

Meskipun demikian fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang meragukan dan menolak untuk di vaksin. Sepertihalnya di Desa Jawisari, pada awal tahun 2021 ketika vaksinasi kepada masyarakat sudah mulai digencarkan, banyak masyarakat yang enggan untuk divaksin. Praktek pelaksanaan program vaksinasi di Desa Jawisari sendiri tergolong sudah cukup baik, dimana masing-masing satgas Covid-19 diberikan tugas untuk memberikan sosialisasi tentang

vaksinasi kepada nama-nama warga yang tercantum dalam *list* yang sudah dibagi oleh sekretaris desa hingga Ia mau memenuhi undangan untuk melakukan vaksinasi. Meskipun demikian, vaksinasi tahap pertama diluar pejabat Desa dan PNS yang ditujukan untuk lansia, masih banyak kuota yang belum terpenuhi sehingga pemerintah harus mencari warga lain yang menyanggupi untuk divaksin di luar undangan.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masih takut untuk divaksin akibat rumor yang beredar mengenai bahaya melakukan vaksinasi, ada pula masyarakat yang tidak percaya adanya Covid-19. Golongan ini meyakini bahwa Covid-19 hanyalah penyakit biasa yang tidak perlu ditakuti, mereka juga menambahkan bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan sehingga mereka lebih memilih untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan (Wawancara, Atik 25 Mei 2022). Amin selaku Kasi Pemerintahan juga menambahkan bahwa yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan vaksinasi tersebut tidak banyak, hanya sekitar 20% dari keseluruhan penduduk. *“Itupun sudah termasuk orang-orang yang tidak vaksin karena ada masalah kesehatan”* imbuhnya (Wawancara, Amin, 25 Mei 2022).

3. Menggosip

Menggosip merupakan salah satu jenis resistensi argumentatif. Dalam kasus ini, perlawanan lebih mengarah kepada pemerintah secara umum bukan pemerintah Desa Jawisari secara khusus. Tindakan ini cenderung mudah dilakukan karena adanya kesamaan pemahaman masing-masing individu. Ketika kebijakan-kebijakan pembatasan sosial mengenai Covid-19 diputuskan, tidak sedikit masyarakat yang resah umumnya dalam dalam hal pembatasan mobilitas dan peniadaan pembelajaran tatap muka. Selain itu, banyak berita-berita yang bermunculan mengenai pelanggaran-pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh petinggi pemerintahan yang membuat kekesalan masyarakat memuncak.

Menyikapi hal tersebut orang-orang yang terdampak saling mengemukakan pendapatnya. Utamanya mengenai ketidaksetujuannya terhadap hal yang sedang terjadi. Ketika melakukan interaksi tersebut, yang menjadi topic

pembicaraan adalah pemerintah. Gosip disebut oleh Scott sebagai senjatanya orang-orang yang kalah. Ia juga menyatakan bahwa gossip merupakan seni “perang” yang memiliki tujuan untuk menajuhkan citra orang yang sedang menjadi topic pembicaraan. Pada tindakan gosip ini, masyarakat kemudian membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Hal tersebut peneliti temukan ketika mengobservasi perkumpulan ibu-ibu yang sedang membeli sayur dimulai dengan pantikan dari salah satu pembeli:

“Wingi to aku nonton berita ning youtube mosok pejabat ngadakke hajatan gedhen-gedhen pas wayah covid ngene. Rak nggenah banget”(Kemarin Saya nonton berita di *Youtube*, masa ada pejabat yang mengadakan perayaan besar-besaran saat Covid seperti ini. Nggak bener banget)

Hal ini kemudian ditanggapi oleh ibu-ibu lain yang berada di sebelahnya: *“Tenane Buk? Wah tiwas dewe ngati-ati tenanan sing kudune dadi contoh kok malah jarkoni”* (Yang benar Buk? Wah padahal kita sendiri sudah benar-benar hati-hati yang harusnya jadi contoh malah hanya menyuruh saja tapi tidak melakukan) (Observasi, Juli 2021).

Budaya menggosip yang dimiliki oleh masyarakat Desa Jawisari dalam hal ini semakin massif dipraktekkan. Peneliti berargumen meskipun terkesan tidak membahayakan karena tidak ada perlawanan secara terbuka yang melawan pemerintah, namun ketika ujaran yang disampaikan dalam obrolan tersebut mendoktrin masing-masing orang yang terlibat maka akan timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah secara umum. Hal itu nantinya akan sangat menghambat jalannya pemerintahan dalam hal ini misalnya pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19.

4. Penarikan Rasa Hormat Kepada Pemerintah

Peneliti berargumen bahwa penarikan rasa hormat kepada penguasa diakibatkan oleh aktivitas menggosip yang telah peneliti jabarkan di atas. Rasa kecewa terhadap tindakan pemerintah yang justru memberikan contoh buruk atas pelanggaran kebijakan yang telah ditetapkan menjadi alasan terbesar masyarakat hilang respek terhadap pemerintah. Terlebih ketika menanggapi pernyataan

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan juru bicara penanganan Covid-19 Achmad Yurianto yang sempat menimbulkan kontroversi akibat pernyataannya yang kurang lebih meminta agar 'si miskin' tidak menularkan Covid-19 kepada 'si kaya'. Meskipun telah memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep 'si kaya' dan 'si miskin' ini. Tetapi masyarakat masih tidak terima dengan pemaparan tersebut hingga menumbuhkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah kepada pemerintah.

Selain itu, kebijakan pembatasan sosial yang berubah-ubah dan terus diterapkan oleh pemerintah nyatanya belum cukup efektif dalam menangani Covid-19. Sehingga masyarakat semakin meragukan kinerja pemerintah yang dianggap tidak maksimal seperti Negara-negara lainnya "*Negara lain sudah banyak yang memperbolehkan kegiatan pengumpulan massa, ga pake masker lagi. Indonesia masih disini-sini aja. Pemerintah ngapoin aja!*"(Wawancara, Galan 30 Mei 2022).

C. Perlawanan Defensif

Sedangkan perlawanan ketiga ialah perlawanan defensif yang dalam pengertiannya Douglas dalam Santos (2002) yakni perlawanan yang dilakukan sebagai tindakan untuk melindungi diri sendiri dengan cara bertahan. Scott sendiri mengelompokkan perlawanan tersebut ke dalam perlawanan tertutup, misalnya kaum tani yang menyembunyikan barang-barangnya agar terhindar dari pajak sehingga dia memiliki cukup uang untuk hidup hari-hari setelahnya. Scott menyampaikan bahwa perlawanan tersebut merupakan bentuk dari bertahan hidup dalam sesuatu yang pelik (Scott, 1993).

Dalam kasus ini wujud perlawanan tersebut adalah pelanggaran pengurangan mobilitas. Kebijakan tersebut diambil karena mobilitas manusia merupakan salah satu faktor yang turut mempercepat penyebaran virus Covid-19. Sepertihalnya yang terjadi di Cina, sebelum menetapkan status *lockdown* sebagian besar laporan mengenai kasus di Cina dilaporkan terjadi umumnya memiliki sejarah perjalanan dari kota Hubei. Adanya waktu yang dibutuhkan untuk gejala dapat

muncul dan teridentifikasi sebagai orang terinfeksi Covid-19 memberikan kesempatan untuk virus tersebut dapat bertransmisi dari satu orang ke banyak orang lainnya di lokasi-lokasi berbeda (Yazid, 2020).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa sejak awal adanya himbauan untuk mengurangi mobilitas masyarakat mengetahui perihal kebijakan tersebut bahkan karena budaya keagamaan mereka yang kental mereka juga mengetahui bahwa ada hadist yang mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi wabah, seperti diriwayatkan dalam hadits dibawah ini:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu."(HR Bukhari) (Firdaus, 2020).

Meskipun telah mengetahui perihal tersebut, mobilitas masyarakat Desa Jawisari masih tergolong tinggi. Banyak ditemui warga yang berlalu-lalang keluar masuk Desa. Tetapi perlawanan tersebut dilakukan umumnya untuk bekerja dan beberapa untuk membeli kebutuhan pokok yang tidak di tersedia di warung-warung terdekat (Wawancara, Amin, 25 Mei 2022). Perlawanan tersebut dikategorikan sebagai perlawanan yang dilakukan untuk bertahan adalah kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Ketika mereka tidak keluar untuk bekerja mereka tidak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup. Sehingga mereka terpaksa bekerja dengan bertaruh pada kesehatan pribadi masing-masing. Banyak kasus Covid-19 di Desa Jawisari yang bersumber dari masyarakat dengan mobilitas tinggi karena tuntutan pekerjaan. Kasus ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Asharie, dkk (2022) dimana perlawanan para nelayan di Desa Cilincing yang melakukan perlawanan dengan tetap melaut diluar jam yang telah

ditentukan oleh pemerintah melalui PSBB berdasar kepada pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup.

Dalam pelaksanaan kebijakan Harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Ketika masyarakat membantu pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dengan patuh terhadap kebijakan yang diambil, maka presentasi kebijakan berjalan dengan maksimal akan meningkat. Namun ketika masyarakat justru resisten seperti yang telah peneliti sampaikan di atas maka juga akan berimbas kepada lancarnya pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jawisari masih belum kooperatif dengan pemerintah perihal penanganan pandemi Covid-19.

BAB V

FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT DESA JAWISARI RESISTEN TERADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19

Perlawanan terhadap kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 merupakan hal yang massif dilakukan selama proses pelaksanaan kewajiban di berbagai wilayah. Hobbes dalam pandangannya menjelaskan bahwa manusia rasional harus menghormati dan mematuhi perintah mereka (pemerintah) karena tanpanya masyarakat akan terjerumus ke dalam perang saudara (Heywood, 2018). Namun persepsi tersebut agaknya kurang tepat ketika dihubungkan dengan perlawanan kondisional akibat Covid-19 ini. Seperti yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, pada awal merebaknya virus Covid-19 tidak terdapat perlawanan yang berarti terkait kebijakan penanganan Covid-19 namun perlawanan tersebut mulai dilakukan sejak akhir tahun 2020 dan semakin massif dilakukan pada tahun 2021. Peneliti berargumen bahwasannya tindakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jawisari sama dengan konsep etika subsistensi atau etika untuk bertahan hidup yang dipaparkan oleh James Scott yang melandasi segala perilaku kaum tani dalam hubungan sosial mereka di pedesaan, termasuk pembangkangan mereka terhadap inovasi yang datang dari penguasa mereka (Siburian, 2019). Begitu pula dalam kasus resistensi masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19 ini, keputusan yang di ambil oleh warga yang melakukan resistensi atas kebijakan tersebut beberapa diantaranya menggunakan konsep etika subsisten dan beberapa lainnya memiliki alasan rasional pula dibalik pilihan tersebut. Oleh sebab itu, pada Bab 5 ini peneliti membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang kemudian mendorong masyarakat Desa Jawisari untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan penanganan Covid-19 serta menyampaikan tanggapan pemerintah Desa Jawisari melihat resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jawisari.

A. Faktor Penyebab Resistensi Masyarakat Desa Jawisari Terhadap Kebijakan penanganan Covid-19

James Scott (1993) dalam studi perlawanan kaum tani menjelaskan bahwa faktor penyebab timbulnya perlawanan dari kaum tani kepada pemilik tanah adalah hilangnya hak kaum tani atas tanah yang menciptakan eksploitasi dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk mahal biaya sewa tanah karena berkewajiban membayar untuk tuan tanah dan pajak negara. Kehilangan tersebut awalnya terjadi karena perubahan pasar yang dikuasai kapitalistik, selain itu pemilik lahan kecil sering bergantung pada elit bertanah misalnya untuk urusan pembelian benih, peralatan, transportasi dan pemasaran serta kadang-kadang kebutuhan kredit sehingga membuat hutang mereka semakin menggunung. Sepertihalnya kaum tani Sedaka yang ada di Malaysia, masyarakat Indonesia khususnya Desa Jawisari juga kehilangan hak kebebasannya karena kebijakan-kebijakan yang diatur pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19. Meskipun memiliki dalih untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi masih terdapat perlawanan-perlawanan atas kebijakan tersebut. Berikut merupakan faktor –faktor yang menyebabkan masyarakat Jawisari resisten terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19:

1. Tidak Mendapatkan BLT-DD

Dampak dari pemilihan Kepala Desa tahun 2020 silam masih terasa hingga saat ini. Bagi perorangan yang masih belum dapat menerima sepenuhnya kekalahan atas calon yang didukung cenderung melihat apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa terpilih dalam sisi buruk (Wawancara, Djarwadi 3 Juni 2022). Hal ini sering terjadi di beberapa daerah yang hanya terdapat 2 kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala desa misalnya saja sengketa yang terjadi di Desa Werot Kabupaten Minahasa Utara. Kekalahan Steven Nelwan atas Fanly Walindow menyebabkan pendukung Steven Nelwan melakukan perlawanan-perlawanan berupa aksi kekerasan, pertikaian antar kedua belah pihak tersebut tak

kunjung usai sehingga menghambat proses pemerintahan (Raras, 2018). Meskipun tidak sampai melakukan aksi kekerasan, ‘perang dingin’ yang menjadi konflik atas kedua kubu yang fanatik tetap menghambat pelaksanaan pemerintahan di Desa Jawisari.

Peneliti menemukan salah satu faktor penyebab masyarakat kemudian acuh dengan segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah penyaluran BLT-DD yang dianggap belum tepat sasaran.

“Mereka (Pemerintah Desa) saja tidak peduli dengan kita yang sedang susah, mengambil keputusan tanpa observasi. BLT-DD yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang terdampak Covid malah diberikan kepada orang mampu” (Wawancara, Narasumber A 27 Mei 2022)

Hal ini kemudian dikuatkan oleh beberapa narasumber lain yang menyatakan kebenaran bahwa penyaluran BLT-DD terkesan tidak terprogram dengan baik, dimana banyak orang-orang yang tidak memenuhi syarat kemudian menjadi salah satu penerima bantuan *“itu lho Mas R padahal suami istri sama-sama kerja tapi dapat sedangkan ibu B yang janda malah gak dapat apa-apa”* (Wawancara, Susfiyati 16 Mei 2022). Namun hal tersebut bukan menjadi alasan bagi narasumber lain dalam melakukan resistensi. Narasumber A menganggap bahwa bantuan tersebut diberikan kepada kerabat atau orang-orang yang mendukung Kepala Desa ketika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Djarwadi selaku Kepala Desa membantah argumen tersebut dan menyatakan bahwa segala bentuk bantuan yang disampaikan kepada masyarakat Desa Jawisari telah mengalami proses *screening* sesuai dengan prosedur yang ditentukan (Wawancara, Djarwadi 3 Juni 2022). Hal tersebut kemudian didukung dengan pernyataan Rokhayati selaku Kasi Perencanaan yang mana dalam menetapkan calon penerima BLT-DD, Pemerintah Desa mengacu pada ketentuan Menteri Desa PDTT diantaranya ; keluarga miskin yang bukan merupakan penerima dana PKH (Program Keluarga Harapan), bukan pula penerima BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), tidak memiliki kartu prakerja, dan yang kehilangan mata pencaharian (Wawancara, Rokhayati 2 Juni 2022).

Apabila dipandang dari sisi perkembangan sosial masyarakat Desa Jawisari pada pembahasan bab 3 sebelumnya bahwa masyarakat Desa Jawisari memiliki mental menerima bukan memberi, sangat dimungkinkan terdapat argumen seperti itu. Belum lagi ditambah pernyataan Djarwadi yang beropini bahwa masyarakat Desa Jawisari itu mayoritas akan iri ketika melihat tetangganya mendapatkan sesuatu. Tidak peduli dia orang mampu atau bukan, ketika dia tidak mendapatkan hak seperti yang lainnya yang dalam hal ini adalah BLT-DD maka akan menuntut untuk mendapatkan hak serupa. Bisa jadi masih banyak masyarakat yang berpikir layaknya Narasumber A ketika melakukan perlawanan tetapi tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan.

2. Kepedulian terhadap pendidikan

Beberapa orang berpendapat bahwa pelaksanaan pembelajaran secara daring telah menurunkan mutu pendidikan di Indonesia (Winandi, 2020), hal itu disebabkan karena adanya banyak kendala ketika pelaksanaan pembelajaran. Zubaedah selaku guru TK Bhakti Pertiwi menyampaikan kendala-kendala tersebut diantaranya: ketidaktahuan pendidik maupun peserta didik mengenai teknologi yang digunakan dalam pembelajaran, terkendala oleh sinyal, tidak bisa membeli kuota internet, dan bahkan tidak memiliki cukup uang untuk membeli gadget. Tidak sedikit pula orang tua siswa yang mengeluh karena dituntut harus bekerja untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari sekaligus mengurus sekolah anak (Wawancara, Zubaedah 2 Juni 2022). Hal yang sama disampaikan oleh Ellsa selaku remaja penggerak literasi bahwa Ia sering menjumpai anak yang harus bolak-balik rumah tetangga hanya untuk mengetahui tugas yang diberikan oleh guru lewat grup WA karena anak tersebut tidak memiliki *smartphone* (Wawancara, Ellsa 16 Mei 2022).

Kendala-kendala tersebut yang kemudian mendorong Warti selaku Kepala Sekolah TK Bhakti Pertiwi melakukan perlawanan dengan melaksanakan pembelajaran secara luring. Warti juga menyampaikan bahwa pembelajaran

secara daring sangat tidak efektif bagi anak didiknya. Karena kemampuan penerimaan materi yang bisa dikatakan belum optimal bagi anak TK.

“Cara memberikan pengajaran untuk anak SD,SMP,SMA dengan TK itu sangat berbeda nduk, perlu ketelatenan yang lebih. Anak TK adalah masa-masa dimana pondasi mereka dalam kehidupan dibentuk, saya khawatir kalau pondasinya saja sudah rapuh bagaimana kehidupan anak ini kedepannya? Saya sungguh memikirkan hal tersebut. Sebagai seorang guru saya merasa sangat bertanggung jawab atas perkembangan murid yang saya didik sehingga tidak cukup dengan kita menyampaikan pembelajaran tersebut lewat media online” (Wawancara, Warti, 2 Juni 2022)

Serupa dengan Warti, Ellsa mengungkapkan alasan tetap melaksanakan kegiatan literasi adalah rasa iba kepada anak-anak yang sering tidak paham dengan materi yang diajarkan. Selain itu, Ia semakin mantap kembali mengadakan kegiatan tersebut karena kegiatan pengajian rutin juga digelar kembali *“Aku mikirnya, tahlil aja udah mulai lagi jadi literasi kayanya bisa jalan”*.

Karena merasa terbantu oleh program-program tersebut, masyarakat Desa Jawisari justru menyambut secara positif. Wali murid dari masing-masing daerah berebut untuk mendapatkan giliran dalam pelaksanaannya. Warti menyampaikan antusiasme baik dari peserta didik maupun wali murid sama-sama membuat hatinya bergetar dan tidak menyesali perlawanan yang Ia lakukan *“Saya akui saya memang melanggar peraturan, tapi itu semua saya lakukan demi anak-anak”* imbuhnya.

Masyarakat sangat menyayangkan atas dilakukannya sidak dari Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Limbangan beserta pemerintahan desa yang menyebabkan anaknya tidak bisa bersekolah lagi. Warti mengaku bahwa Ia pernah dihampiri seorang wali murid yang usianya sudah senja dan berkata kepadanya *“Saiki sekolah wae kudu sampe ngumpet-ngumpet ya Bu koyo jaman londo”* (Sekarang Sekolah saja harus sembunyi-sembunyi ya Bu dama seperti zaman penjajahan) (Wawancara, Warti, 2 Juni 2022). Berdasarkan pernyataan tersebut terselip anggapan bahwa pemerintah saat itu terkesan seperti penjajah yang melarang masyarakat pribumi untuk sekolah. Padahal kebijakan yang diambil semata-mata untuk kemaslahatan bersama, meskipun eksekusi terhadap kebijakan tersebut masih sangat kurang.

3. Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari

Mayoritas masyarakat Desa Jawisari yang melakukan perlawanan dalam bentuk massifnya mobilitas adalah orang-orang yang bekerja di luar Desa Jawisari. Berdasarkan data agregat dispendukcapil Kabupaten Kendal tahun 2021, masyarakat Desa Jawisari paling banyak berprofesi sebagai pegawai swasta yang didominasi oleh buruh pabrik. Sehingga mengharuskan mereka untuk sering keluar masuk desa sesuai penjadwalan tempat Ia bekerja. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat pekerja tersebut bukan tanpa alasan, dibelakangnya ada keluarga yang harus dihidupi. Bergantung kepada bantuan pemerintah tidak akan cukup terlebih ketika orang tersebut adalah satu-satunya orang yang mencari nafkah dalam keluarganya. Hal ini sama dengan kasus petani Asia -Tenggara yang menyembunyikan beras serta barang-barang miliknya dari pengumpul pajak untuk menghindari pajak yang tinggi sehingga Ia memiliki cukup uang untuk menghidupi keluarganya (Scott, 1993). Scott yang menyampaikan bahwasannya tujuan kaum tani pada umumnya bukan untuk menumbangkan atau mengubah sistem dominasi, melainkan untuk bertahan hidup hari ini dan kedepannya. Pernyataan tersebut kemudian dikuatkan dengan kutipan dari Hobsbawn yang menyatakan bahwa tujuan kaum tani adalah bekerja dalam sistem dengan kerugian sesedikit mungkin.’ Hendro sebagai salah satu pekerja pabrik kayu mengungkapkan:

“Pabrikku rak tau libur mbak, nek aku trus rak mangkat yo rak ndue duit dong. Meh ngandalke bantuan seko pemerintah yo ora sepirakno. nek gawe urip sak ben dino yo kurang to”(Pabrikku gak pernah libur mbak, kalau saya gak berangkat ya saya gak punya uang dong. Mau mengandalkan bantuan pemerintah ya tidak seberapa, untuk hidup setiap hari juga kurang) (Wawancara, Hendro 30 Mei 2022)

Hendro menambahkan bahwa pabrik di tempatnya bekerja juga sangat kooperatif dalam menanggapi pandemic Covid-19. Pihak pabrik mewajibkan seluruh pegawainya untuk tetapi mematuhi protokol kesehatan. Pihak pabrik juga

memberikan kompensasi kepada pegawai yang terpapar Covid-19. Hal ini juga disampaikan oleh Tyas yang bekerja di Pabrik garmen di daerah Boja:

“Toh ning pabrik juga kita tetep patuh prokes kok, misale memang kita ono indikasi keno covid yo gak oleh mangkat. Aku lho mbak pernah keno Covid, pabrikku ngongkon aku isoman ning ngomah nek di tes swab meneh wes gak keno ijek kon ngenteni 10 dino ngkas. Tapi alhamdulillah tetep di bayar meskipun rak mangkat.”(Di pabrik juga kita tetap patuh prokes kok misalkan memang kita ada yang terindikasi terkena Covid ya kita gak boleh berangkat. Saya pernah terpapar Covid, pabrik saya memerintahkan saya untuk isoman di rumah. Ketika di tes swab ulang sudah tidak positif masih tetap harus menunggu sampai 10 hari. Tapi alhamdulillahnya tetap di bayar meskipun tidak berangkat)(Wawancara, Tyas 30 Mei 2022).

Selain itu, terkait pelanggaran penggunaan masker. Salah satu alasan Masyarakat Desa Jawisari tidak menggunakan masker ketika berada diluar ruangan adalah profesi mereka yang mayoritas adalah petani. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan petani adalah aksi nyata yang menguras tenaga sehingga ketika menggunakan masker maka udara yang mereka hirup akan terbatas dan justru berbahaya. *“Saiki ya mbak, mosok aku macul kon nganggo masker? Yo pengep raiso ambegan. Nek ora macul yo ora oleh duit, rak ndue duit yo rak iso mangan, kan ngono to”*(Sekarang ya Mbak, masa saya mencangkul harus memakai masker? Ya pengap Saya tidak bisa bernafas. Kalau tidak mencangkul Saya tidak punya uang kalau tidak punya uang Saya tidak makan, yakan?).

Beberapa warga juga menambahkan mengenai keberatannya terhadap biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli masker medis yang dianjurkan oleh kementerian kesehatan. Bagi mereka menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari lebih bijak daripada harus dibelikan masker yang juga akan langsung habis sekali pakai, terlebih ketika awal merebaknya Covid-19 yang menyebabkan harga masker membumbung tinggi tahun 2020-an akibat oknum-oknum yang menimbun masker. Pemberian masker dari pemerintah desa juga tidak dapat meng-cover kebutuhan masyarakat akan masker itu sendiri.

4. Desakan Jama'ah Tahlil

Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Jawisari adalah tidak melakukan kegiatan yang membuat kerumunan termasuk diantaranya melakukan pengajian tahlilan yang memang rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Jawisari. Kebijakan ini kembali diambil setelah sebelumnya mulai berangsur diizinkan adalah karena ada masyarakat Desa Jawisari yang terkena Covid-19 yang mana ini merupakan kali pertama sejak munculnya virus Covid-19 di Indonesia. Meskipun demikian, masyarakat Desa Jawisari khususnya Dusun Lebari masih tetap mengadakan pengajian seperti biasanya. Salah satu alasan mengapa mereka tetap acuh adalah karena orang yang terpapar Covid-19 berada di Dusun Krajan sedangkan penduduk Dusun Lebari yang terindikasi terkena virus selama terpapar tidak menetap di Desa namun isolasi di rumah sakit. (Observasi, Agustus 2021)

Pelaksanaan pengajian rutin yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Lebari pasti tidak lepas dari tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat dalam menentukan pilihan. Namun Zulaikhah selaku tokoh agama Dusun Lebari justru mengaku bahwa Ia tidak tau menau mengenai dilaksanakannya kembali pengajian rutin *“Aku yo rak ngerti Mbak, tiba-tiba ono sing ngomong “Mbah, mangkih Tahlile pangkat nggih”* (Saya juga tidak tau Mbak, tiba-tiba ada yang berbicara *“Mbah, nanti Tahlilnya berangkat ya”*). Zulaikha menambahkan bahwa selama ini masyarakat sering berkunjung ke rumahnya untuk menanyakan apakah kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tahlil sudah boleh dilakukan, tetapi Zulaikhah selalu menjawab untuk menunggu hingga keadaan sudah membaik (Wawancara, Zulaikhah 16 Mei 2022).

Peneliti beropini, argumen Zulaikhah tentang melaksanakan kembali kegiatan keagamaan ketika keadaan sudah membaik, menjadi dasar bagi masyarakat Dusun Lebari dalam membuat kesepakatan untuk kembali melaksanakan tahlil. Zulaikhah sendiri juga memaparkan bahwa mereka tidak memiliki dalil khusus yang bertentangan dengan Q.S An-Nissa ayat 59 tentang kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Bagi masyarakat Desa Jawisari pengajian rutin dianggap

sebagai salah satu ikhtiar untuk tetap yakin bahwa Allah pasti akan membawa kemudahan dalam setiap musibah. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sunirah:

“Sak niki Mbak, dongo yen dilakoni dewean karo dongo yen dilakoni bareng-bareng lak yo bedo. Doa nek bareng-bareng insyaAllah gusti Allah luwih gampang ngijabahi. Toh dewe yo pengene tetep Covid ndang rampung. Mosok agama dikalahke karo penyakit, ya to?”(Sekarang Mbak, doa kalau dilakukan sendirian dengan doa yang dilakukan bersama-sama kan berbeda. Doa kalau dilakukan bersama-sama insyaAllah Allah akan lebih mudah untuk mengabdikan. Kita juga ingin Covid segera selesai. Masa agama dikalahkan dengan penyakit, ya kan?) (Wawancara, Sunirah 16 Meri 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut semakin menguatkan argumen Scott (1993) mengenai konsep keagamaan yang menyebutkan bahwa Islam memberikan doktrin yang kuat pada penganutnya agar memfokuskan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat yang dilakukan melalui ibadah-ibadah keagamaan. Peneliti berargumen mereka menganggap bahwa ketaatannya dalam beribadah baik wajib maupun sunnah lebih penting dibandingkan dengan ketakutan terhadap virus Covid-19. Atik selaku BPD menyatakan bahwa ketika Ia menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Covid-19 terutama mengenai pengajian yang dliburkan banyak masyarakat yang mengatasnamakan agama untuk melawan peraturan tersebut seperti halnya: *“Halah, Bu karo penyakit wae kok wedi. Wedi kui karo gusti Allah”*(Halah, Bu. Sama penyakit saja takut. Takut itu sama Allah) (Wawancara, Atik 25 Mei 2022).

5. Sosialisasi yang Kurang Efektif

Untuk memberikan pengetahuan mengenai Covid-19, pemerintah Desa Jawisari melakukan program sosialisasi dalam beberapa kegiatan. Yang pertama adalah sosialisasi lewat media sosial yaitu WhatsApp (WA) Group. Grup WA ini dijadikan pemerintah Desa Jawisari sebagai alat komunikasi mengenai pengetahuan tentang Covid-19 meliputi bahaya Covid, penerapan protokol kesehatan seperti dibagikan video mencuci tangan yang benar, juga sebagai wadah keluhan masyarakat ketika ada orang yang terindikasi terpapar Covid-19. Yang menjadi anggota grup WA tersebut adalah Kepala Desa, perangkat Desa, tenaga

kesehatan dan beberapa tokoh masyarakat. Informasi yang disebarakan lewat grup tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat secara umum melalui ketua masing-masing RT (Wawancara, Rokhayati, 2 Juni 2022).

Selain itu kegiatan sosialisasi lainnya juga disampaikan melalui kegiatan menyusur Desa menggunakan mobil pick-up dan menyampaikan himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan menggunakan pengeras suara. Sumiyati mengungkapkan dalam penyampaian tersebut kurang lebih seperti ini :

“..... Kepada masyarakat Dusun Krajan dihimbau untuk tetap di rumah saja, tetap menggunakan masker ketika keluar rumah, dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun.....” (Wawancara, Sumiyati, 1 Juni 2022)

Berdasarkan penjabaran pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jawisari di atas, ada narasumber yang saya wawancarai yang menyatakan bahwa:

“Masih kurang banget Mbak, Saya akui Saya memang bukan remaja yang aktif di Desa mungkin saja pihak pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi kepada remaja desa tapi saya gak ikut. Tapi seharusnya sosialisai kan menjangkau semua orang jadi menurutku harusnya ada program yang lebih bagus lagi, tapi untuk sosialisasi dari desa sendiri Saya gak pernah dapet mbak, Saya tau info-info soal Covid ya dari internet”

Pelaksanaan sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Desa Jawisari menurut Rokhayati telah dilakukan yaitu sosialisasi yang disampaikan dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh pihak RT ketika pelaksanaan tahlilan rutin, kemudian jamaah tahlil tersebut diminta untuk menyampaikan informasi soal Covid tersebut kepada seluruh anggota keluarganya (Wawancara, Rokhayati, 2 Juni 2022). Dari penyampaian Rokhayati ada beberapa kemungkinan mengapa sosialisasi tersebut berjalan tidak efektif. Yang pertama, pelaksanaan tahlilan rutin sempat ditiadakan selama beberapa bulan sehingga tidak ada wadah sosialisasi secara langsung yang disampaikan oleh ketua RT. Selain itu, RT juga menginstruksikan untuk dapat mensosialisasikan kembali kepada keluarga di rumah. Namun realitanya tidak semua masyarakat Desa Jawisari mengikuti

agenda agama tersebut. Selain itu, ada kemungkinan jamaah tahlil tersebut lupa untuk menyampaikan informasi tersebut kepada keluarganya. Informasi yang tidak sampai kepada seluruh penduduk utamanya adalah tidak transparannya pemerintah desa terhadap kasus yang ada di Jawisari. Informasi mengenai berapa dan siapa yang terpapar Covid-19 tidak menyebar secara menyeluruh juga tidak dapat diakses di portal desa, sehingga kewaspadaan masyarakat Jawisari juga kurang maksimal.

6. Tenaga Kesehatan yang Kurang Maksimal dalam Menangani Pandemi Covid-19

Bidan Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19. Sebagai profesi yang bergerak dalam bidang kesehatan, bidan desa merupakan garda terdepan untuk menggerakkan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di desa. Hal ini akan lebih mudah dilakukan ketika bidan desa berada di Poli Kesehatan Desa (PKD) yang telah disediakan. Namun bidan Desa Jawisari tidak menempati poli tersebut karena tempat tinggalnya yang berada di desa sebelah Desa Jawisari.

Meskipun tidak tinggal di Desa Jawisari, tetapi bidan desa telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan edukasi terkepada masyarakat Desa Jawisari mengenai bahaya Covid-19 beserta cara mencegahnya.

“Ada grup satgas Covid yang memang dibentuk untuk koordinasi masalah Covid, saya juga menyampaikan apa saja yang seharusnya dilakukan ketika menghadapi pandemi ini saya share semua di grup itu Mbak. Meskipun saya gak tinggal di PKD tapi komunikasi di grup tersebut terus berjalan jadi saya bisa memantau lewat grup tersebut” (Esti, 2 Juni 2022)

Esti juga menyatakan bahwa Ia selalu mengawasi pasien yang terpapar Covid-19 dengan memberikan sosialisasi secara langsung ke rumah warga yang terpapar terkait cara untuk melakukan isolasi mandiri. Namun hal tersebut tidak selaras dengan pernyataan Atik yang menyampaikan bahwa Ia sempat merasa kebingungan ketika mengurus ayahnya yang terpapar virus Covid-19. Ia mengaku bahwa informasi mengenai tata cara isolasi mandiri Ia dapatkan dari kawannya yang bekerja di bidang kesehatan (Wawancara, Atik 25 Mei 2022). Usaha yang

dilakukan oleh bidan desa tersebut juga dirasa masih kurang bagi sebagian masyarakat Desa Jawisari sendiri. Banyak yang mengeluhkan tentang kurang maksimalnya bidan desa dalam menangani Covid-19. Seperti yang disampaikan oleh Ellsa dan Galan berikut ini:

“Pernah Mbak, awal-awal ada Covid itu, ada warga yang baru pulang dari Cirebon. Itu kan dari luar daerah ya Mbak, jadi kita bingung harusnya bagaimana. Apa langsung isolasi mandiri di rumah atau harus cek dulu ke puskesmas. Nunggu kabar dari Bu bidan lama banget kasian bapaknya kedinginan karena abis di semprot disinfektan dan harus nunggu berjam-jam di pos kamling” (Wawancara, Ellsa 16 Mei 2022)

“Bidan nggak tinggal di PKD tu sebenarnya masalah banget sih Mbak, apalagi pas masa kaya gini. Misal ada butuh obat atau tanya-tanya masalah Covid secara langsung juga gak bisa. Liat berita sekarang banyak yang ga bener jadi buat tau yang bener kemana lagi kalo bidan aja gak ada, mau chat juga sungkan” (Wawancara, Galan, 30 Mei 2022)

Selain itu, Aji juga menambahkan bahwa kurang maksimalnya bidan desa terkait penanganan Covid-19 karena bidan desa pernah positif terpapar virus Covid-19.

“Bu bidan itu sempat kena Covid Mbak, menurutku cara penyampaian tentang Covid ini harus kalem, maksudnya kata-katnya dipilih yang adem biar masyarakat juga gak panik. Tapi karena pernah kena itu bu bidan jadi terkesan menakut-nakuti dengan cerita apa yang dia alami. Aku aja yang denger jadi tambah parno”

Warga mengharapkan bidan desa dapat lebih aktif lagi dalam menangani pandemi Covid-19. Karena mereka sangat membutuhkan bimbingan berupa informasi yang akurat dari tenaga kesehatan yang dapat dipercaya.

Penelitian yang dilakukan oleh James Scott didapati bahwa faktor utama pendorong resistensi masyarakat adalah faktor ekonomi karena desakan hutang kepada tuan tanah dan faktor politik yaitu permainan kapitalis terhadap pasar dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru memberatkan masyarakat. Dalam penelitian ini didapati tidak hanya faktor ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan faktor politik seperti kebijakan pemberian BLT-DD yang dirasa belum tepat sasaran serta pelaksanaan penanganan yang belum maksimal. Tetapi

juga terdapat faktor-faktor lain seperti faktor budaya keagamaan dimana masyarakat tetap mempertahankan budaya tahlilan, dan faktor pendidikan.

B. Tanggapan Pemerintah Terhadap Masyarakat yang Melakukan Perlawanan

Pemerintah tidak mengelak mengenai perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Jawisari terkait kebijakan penanganan Covid-19. Mereka paham betul bahwa perlawanan-perlawanan tersebut terjadi. Namun, menurut peneliti pemerintah Desa Jawisari tidak mengambil tindakan yang berarti dalam menangani perlawanan-perlawanan tersebut. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang beranggapan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jawisari adalah perlawanan yang rasional “*Jangan mentidaknormalkan yang normal, walaupun masyarakat tidak menggunakan masker*” ungkap Mukhlisin. Ia menganggap perlawanan tersebut merupakan hal yang wajar sehingga tidak memerlukan perhatian yang serius dalam penanganannya. Mukhlisin menyatakan bahwa pemerintah desa tidak bisa terus menerus mengawasi kegiatan masyarakat terkait pelanggaran kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari “*kan nggak mungkin kita ngawasi orang di sawah pakai masker atau tidak*”. Ia juga menambahkan bahwa yang melakukan pelanggaran hanya sebagian kecil dari keseluruhan masyarakat sehingga itu bukan menjadi sebuah masalah (Wawancara, Mukhlisin, 25 Mei 2021). Sedangkan berdasarkan hasil observasi peneliti, pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat massif dilakukan terutama dalam hal pemakaian masker. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Jawisari tidak memberikan perhatian lebih terhadap penerapan kebijakan pada masyarakat sedangkan kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menekan laju persebaran virus Covid-19.

Salah satu aspek yang mempengaruhi jalannya kebijakan publik menurut Arina dkk (2020) adalah disposisi atau tabiat dari pelaksanaan kebijakan. Bisa dalam bentuk kejuruan, disiplin, kecerdasan, dan komitmen. Jika pelaksana kebijakan memiliki tabiat yang baik, maka proses pelaksanaan kebijakan akan

berjalan dengan lancar. Begitupun sebaliknya jika pelaksana kebijakan memiliki tabiat yang buruk, maka proses pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam kasus ini disposisi pelaksanaan kebijakan yaitu masyarakat Desa Jawisari masih tergolong tidak cukup baik karena ketidakdisiplinan mereka dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga berdampak kepada pelaksanaan kebijakan yang belum mencapai kata berhasil.

Suksesnya suatu kebijakan juga bergantung pada pembuat kebijakan dalam praktek pembuatan pengawasan maupun evaluasi terhadap kebijakan yang diambil. Atik menyampaikan bahwa kerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 hanya sebatas menunaikan kewajiban yang dapat dilihat. Misalnya dalam pelaksanaan vaksinasi, pemerintah desa cenderung fokus kepada keberhasilan mereka mem-vaksin kurang lebih 80% dari seluruh warga. Mereka menganggap bahwa presentase tersebut sudah sangat fantastis didukung dengan apresiasi yang diberikan oleh pihak kecamatan atas hal tersebut. Namun mereka lupa bahwa diantara 20% orang yang belum tervaksin ada orang-orang yang tidak melakukan vaksinasi akibat ketidakpercayaannya terhadap Covid-19. Atik menyatakan bahwa ketidakpercayaan warga tersebut sangat menghambat penanganan Covid-19 (Wawancara, Atik 25 Mei 2022). Ketika dia tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah di ambil dan pemerintah tidak memberikan tindakan, hal ini dapat menjadikan warga lain merasa bahwa pelanggaran tersebut bukan suatu hal yang serius sehingga presentase mereka akan meniru menjadi lebih tinggi. Kembali lagi, jika disposisi buruk maka pelaksanaan kebijakan tidak akan optimal.

Tanggapan pemerintah Desa Jawisari hanya sebatas tetap melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat Desa Jawisari. Sepertihalnya Amin, Ia memberikan contoh ketika Ia berpapasan dengan warga yang tidak menggunakan masker, maka Ia akan langsung menegur dan memberikan masker untuk dipakai. Hal tersebut juga disampaikan oleh Aji, bedanya dia mencontohkan warga yang tidak mau melakukan vaksinasi, cara yang Ia tempuh dalam menghadapi orang yang tidak mau vaksin adalah dengan memberikan pengertian

secara terus menerus kepada warga tersebut melalui sosialisasi secara langsung dan poster-poster yang Ia tempelkan di tempat-tempat umum hal tersebut dilakukan karena prinsipnya yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, Ia menghargai segala keputusan yang diambil oleh masing-masing pribadi masyarakat termasuk terkait ketaatan terhadap kebijakan (Wawancara, Aji, 2 Juni 2022).

Djarwadi menyampaikan bahwa masyarakat Desa Jawisari tidak bisa diperingatkan menggunakan kekerasan. Sehingga Djarwadi memilih cara aman untuk menangani masyarakat yang melakukan perlawanan. Vaksinasi misalnya, orang yang enggan melakukan vaksinasi selain diberi teguran, Djarwadi juga meminta kepada pengurus program BLT untuk memberlakukan wajib vaksin ketika ingin mengambil bantuan tersebut. *“Meskipun tidak turun tangan secara langsung tapi masalah terselesaikan”* tuturnya.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai resistensi masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19 dapat ditarik ke dalam beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Pandemi Covid-19 merupakan diskursus yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat khususnya di Indonesia terkait penanganan pandemi Covid-19. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah pada awal adanya Covid-19 adalah tidak memberikan kebijakan lockdown (karantina wilayah). Hal ini karena adanya pertimbangan mengenai dampak-dampak yang akan menyerang sektor ekonomi maupun sosial. Sebagai gantinya pemerintah meberlakukan pembatasan sosial lain yang dikemas dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari level 1-4.

Kebijakan-kebijakan tersebut dirasa merugikan masyarakat sehingga terjadi perlawanan di beberapa wilayah. Termasuk level *grassroot* di Desa Jawisari. Perlawanan-perlawanan yang terjadi di Desa Jawisari digolongkan ke dalam tiga bagian. Yang pertama yaitu perlawanan terbuka, menurut Scott perlawanan terbuka merupakan tindakan terorganisir yang biasanya berupa pemberontakan, namun perlawanan terbuka dalam kajian ini merupakan perlawanan masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan secara terang-terangan dalam bentuk pelanggaran pemakaian masker diruang terbuka, pengadaan pembelajaran secara luring, pengadaan kegiatan keagamaan yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan penolakan terhadap vaksinasi. Yang kedua adalah resistensi tertutup yang berupa perlawanan argumentatif dalam bentuk menggosipkan pemerintah yang tidak taat kepada kebijakan dan penarikan rasa hormat terhadap pemerintah karena kehilangan kepercayaan dan yang ketiga

adalah perlawanan defensif yaitu perlawanan untuk pertahanan yang berbentuk mobilitas tinggi untuk bekerja.

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Jawisari melakukan resistensi adalah pertama karena tidak mendapatkan BLT-DD, bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran sehingga memunculkan perasaan iri, kedua karena kepedulian penggiat pendidikan terhadap mutu pendidikan yang didapatkan oleh peserta didik, ketiga pemenuhan kehidupan sehari-hari merupakan alasan masyarakat untuk dapat terus bertahan hidup, keempat desakan jama'ah, pelaksanaan kegiatan keagamaan tetap diadakan karena adanya kesepakatan dari masyarakat yang menginginkan kegiatan keagamaan tetap berjalan, kelima yaitu sosialisasi yang kurang efektif, meskipun telah dilakukan beberapa praktek sosialisasi oleh pemerintah desa namun sosialisasi tersebut belum mencakup keseluruhan penduduk sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi lengkap mengenai Covid-19, serta yang terakhir adalah tenaga kesehatan yang kurang maksimal dalam menangani pandemi Covid-19, tidak menetapnya bidan desa di PKD menjadi masalah yang cukup krusial bagi masyarakat Desa Jawisari karena sulitnya mendapat informasi secara langsung dari pihak tenaga kesehatan yang dapat dibuktikan kebenarannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang bisa peneliti sampaikan sebagai dasar bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk pihak pemerintah, dalam menjalankan suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan mengenai penanganan Covid-19 baiknya dilakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat melakukan evaluasi untuk penerapan kebijakan yang maksimal. Selain itu, diperlukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Desa Jawisari salah satunya bisa dilakukan dengan cara membentuk kelompok yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi secara *door to door* ke rumah

seluruh warga. Pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar misalnya dalam bentuk sanksi sosial juga dapat menjadi alternatif untuk memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga ketegasan pemerintah juga tampak.

2. Kepada masyarakat Desa Jawisari, sebaiknya sebelum melakukan tindakan pelanggaran terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, masyarakat Desa Jawisari mempelajari terlebih dahulu tujuan kebijakan tersebut. Karena pada dasarnya kebijakan diambil untuk kemaslahatan bersama. Selain itu, masyarakat juga harus tetap bijak dengan menurunkan ego dan menjadi lebih peduli kepada keselamatan bersama dengan tidak melakukan pelanggaran kebijakan penanganan Covid-19 yang dapat membahayakan kesehatan baik diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Adifirsta, Mayedha. (2021). Resistensi Kalangan Pengusaha Kafe dan Resto atas Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 . Dalam UMM Institutional Repository.
- Aji, Muhammad Purnomo dan Martinus Legowo. (2020). Resistensi Masyarakat Ujungnegoro Pasca Pembangunan PLTU di Batang Jawa Tengah. Dalam PARADIGMA
- Anwar, Chairul. (2017). *Buku Terlengkap Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Arifin, Novrizal. (2017). Resistensi Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja di Desa Bulu Kerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Dalam Unair.
- Asharie, Henny Kurnia, Nadhira S Jasmin, dan Nandita (2022). Resistensi Nelayan Cilincing Di Masa Pandemi Covid-19. Dalam Jurnal Diskursus Pendidikan Sosiologi.
- Azanella, Luthfia Ayu. Virus Corona, Penyebab, Gejala, Pencegahan, dan Kapan Harus Segera ke Dokter. Dalam Kompas.com, diakses pada 17 Februari 2022.
- Creswell, John. Ward. (2017). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Eril Sastra dan Eka Vidya Putra (2019). Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Gunung Talang Kabupaten Solok. Dalam Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan.
- Hanum, Zubaedah. *Satu Tahun Perjalanan Covid-19, Maret yang Mencekam*. Dalam [mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/humaniora/387702/satu-tahun-perjalanan-covid-19-maret-yang-menceka](https://mediaindonesia.com/humaniora/387702/satu-tahun-perjalanan-covid-19-maret-yang-menceka), diakses pada 28 Maret 2022.
- Harrison, Lisa. (2009). *Metode Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.

- Hasanah, Hasyim. (2016). Teknik-Teknik Observasi. Dalam Jurnal at-Taqaddum.
- Henry. *Kasus Antrean Panjang demi BTS Meal Berujung Penyegehan Gerai di Berbagai Kota*. dalam Liputan6.com. diakses pada 14 Maret 2022.
- Hidayah, Ahmad. (2021). Praktik Pendisiplinan Tubuh dan Resistensi Masyarakat Pelaku Usaha Wisata Bahari Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pulau Derawan, Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Dalam Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education.
- Lilja, Mona dan Stellan Vinthagen (2018). Dispersed resistance: unpacking the spectrum and properties of glaring and everyday resistance. *Journal of Political Power*.
- Massie, Alessandro Yosafat dan Kristina Roseven Nababan (2021). Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Pendidikan Karakter Siswa. Satya Widya.
- Niswanti, Rahmi. (2019). Pemanfaatan kampung seni jelekong sebagai sumber belajar IPS. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Panca, Tri. (2011). Resistensi Pedagang Masyarakat Sumber Arta Bekasi Barat. *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Perasso, Britt Yip dan Valentina. *Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?* dalam BBC World Service: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>, diakses pada 15 Januari 2022.
- Pramudita, Budi Gunawan dan Selly Irawati. (2020). Resistensi Warga di Bantaran Ciliwung terhadap Rencana Penggusuran oleh Pemerintah. Dalam JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial.
- Raras, Brigita. (2018). Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot Tahun 2016 di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Politico*.
- Rustam, dan Sukring (Rustam, 2016). (2016). Pembrontakan terhadap pemerintahan yang sah (bugah) dalam perspektif hukum islam. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*.
- Santos, Thomas. (2002). *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Satgas Penanganan Covid-19. (2021). *Panduan Pelaksanaan Protokol Kesehatan*. Satgas Penanganan COVID-19.

- Scott, James (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Servatius, F. X. Fajar Ly No dan Rodriques. (2019). NEGARA VERSUS MASYARAKAT ADAT: Studi tentang Resistensi Masyarakat Adat Dhawe atas Keputusan Pemerintah Kabupaten Nagekeo tentang Alih Fungsi Lahan Mabay Kiri. Dalam *Warta Governare*
- Syafrida, Ralang Hartati. (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. Dalam *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*
- Wahyuningsih, Sri. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM Press.
- Wawan, Khoirunnisa dan Nurul Patmah. (2021). Keadilan Lingkungan Dalam Gerakan Perlawanan (Resistensi Masyarakat Adat Kasepuhan Bayah Terhadap PT. Cemindo Gemilang). Dalam *International Journal of Demos*.
- Winandi, Galih Tegar (2020). *Perencanaan Pendidikan Pada Masa Pasca Pandemi Covid-19*. Universitas Negeri Semarang.
- Wiryono, Singgih. *Pelanggaran Tak Pakai Masker di Jakarta Capai 316.754 Kasus*. dalam Kompas.com. diakses pada 8 Februari 2022.
- Yazid, Sylvia dan Liliana Dea Jovita (2020). Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan*.
- Yuwono, Agust Eko. (2010). Resistensi Masyarakat Terhadap Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Dalam *Unnes Pilitical Sience Jurnal*.

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Foto Kegiatan Wawancara







Lampiran 2

Biografi Penulis



A. Identitas Diri

1. Nama : Tiara Candra Wijyanti
2. Nim : 1806016071
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kendal/27 November 1996
4. Alamat : Rt1/1 Desa Jawisari, Limbangan, Kendal
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No. HP : 085855412815
8. Email : tiaracandrawijayanti@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN JAWISARI
2. SMPN 3 BOJA
3. SMAN 1 BOJA

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2022

Saya yang bersangkutan



Tiara Candra Wijayanti

1806016071